Carilan 2 buah journal yang saling terkait. lakukan analisis terhadap persamaan dan perbedaaan dari kedua artikel tersebut!

1. **Judul:** Leveraging large face recognition data for emotion classification
Peneliti, Media Publikasi: Boris Knyazev, Roman Shvetsov, Natalia Efremova, dan Artem Kuharenko. Media publikasi IEEE Computer Society
Tahun: 2018
Pokok Penelitian/Pokok Bahasan: Menjelaskan solusi untuk kami entri untuk tantangan pengakuan emosi EmotiW 2017. menunjukkan bahwa penggunaan kuat industri-tingkat pengenalan wajah jaringan meningkat akurasi pengenalan emosi. Menggunakan ensemble jurnal ini memperbaiki hasil tahun sebelumnya terbaik tentang tes set oleh sekitar 1%, mencapai% klasifikasi akurasi 60,03 tanpa penggunaan informasi sementara visual.

Metode Penelitian/pipe line penelitian:

Pipe line dari jurnal ini ada 5 tahap

1. Deteksi Wajah: Untuk mengekstrak dan menyelaraskan wajah baik dari gambar FER2013 dan frame video EmotiW kita menggunakan detektor dlib wajah. Jika wajah tidak ditemukan pada frame, seluruh frame dilewatkan ke jaringan karena dua alasan. Petama jaringan masih bisa menangkap beberapa isyarat kontekstual diberikan seluruh frame, dan kedua, untuk beberapa video semua deteksi wajah yang positif palsu.

2. Ekstrasi fitur frames: Fitur untuk semua frame yang dihitung dengan menggunakan 4 jaringan. Untuk VGG-Face, kita secara empiris pilih 4096 dimensi FC6 fitur (setelah lapisan terhubung sepenuhnya), sedangkan untuk jaringan lain kita menggunakan 1024 fitur dimensi dari lapisan sebelum yang terakhir.

3. Agregasi fitur Bingkai-tingkat: menghitung fitur video dengan satu atau beberapa fungsi secara agregat gation (misalnya, rata-rata atau standar deviasi) diikuti oleh rescaling untuk berbagai [0, 1] dan Rangkaian. dalam kasus VGG-Wajah jika kita menghitung berarti menunjukkan sebagai STAT *, maka fitur 12288 dan min fitur, yang kami menunjukkan sebagai STAT *, maka fitur 12288 dan min fitur, yang kami menunjukkan sebagai STAT *, maka fitur 12288 dimensi. Dalam karya ini, rootsift normalisasi (tanda(x) √ | x | / ‖ x ‖ 1) [2] dan standardisasi global juga diterapkan pada fitur bersambung.

4. Klasifikasi: Sebuah SVM linier dilatih pada data pelatihan (satu SVM per jaringan) dalam kasus pelaporan akurasi validasi dan, seperti pada [9], pada pelatihan ditambah validasi data dalam kasus akurasi tes. Regularisasi konstan SVMs ditemukan oleh 5 kali lipat cross-validasi.

5. Ensembling dengan fitur audio: Kami menghitung 1582 fitur audio 5) Ensembling dengan fitur audio: Kami menghitung 1582 fitur audio dimensi menggunakan perpustakaan Opensmile [8]. Kami melatih SVM linear dalam kasus ini juga, sehingga ensemble skor kami rata-rata dari 5 SVMs total.

Hasil: Emosi yang benar. LSTMs dilatih di atas jaringan FR-Net-B pada urutan penuh analog ke [9]. Namun, kami tidak mampu meningkatkan kinerja kami pada tes set dengan menambahkan LSTMs
Kelebihan: Dengan menggunakan esemble paper ini memperbaiki hasil tahun sebelumnya tentan tes set dengan hasil akurasi 60,03.
Kekurangan: Tidak bisa meningkatkan kinerja pada tes set dengan menambahkan LSTMs.
Perbandingan dengan Metode/Penelitian Usulan: Perbedaan dari penelitian dengan yang saya lakukan adalah, penelitian ini menggunakan klasifikasi SVM linier dilatih pada data pelatihan (satu SVM per jaringan). Sedangkan metode saya sebelumnya menggunakan haar-cascade classifier dengan metode PCA yang mampu mendeteksi wajah hanya dengan waktu 1 detik per wajah.

No. 2
Judul: Intelligent face recognition and navigation system using neural learning for smart security in Internet of Things
Peneliti, Media Publikasi: Priyan Malarvizhi Kumar, Ushadevi Gandhi, R. Varatharajan, Gunasekaran Manogaran, Jidhesh R., Thanjai Vadivel, Media Publikasi Digital Object Identifier System
Tahun: 2017
Pokok Penelitian/Pokok Bahasan: Pembuatan aplikasi mobile pengenalan gambar dan sistem aplikasi baru yang menyediakan kecepatan dan ketepatan pesan dalam bentuk audio untuk orang-orang yang mengalami gangguan visual sehingga mereka dapat menavigasi dengan mudah.

Metode Penelitian/pipe line penelitian:

Panduan buta adalah sebuah inovasi dalam kerangka rute untuk individu cacat visual. Produk ini diimplementasikan pada ponsel berbasis android canggih yang dikombinasikan dengan sensor ultrasonic. Sensor ultrasonik termasuk jarak jauh menggunakan peralatan berbasis mikrokontroler dan berbicara dengan Smartphone menggunakan Bluetooth.

1. Modul Smartphone

Smartphone terdiri dari aplikasi yang diinstal pada sistem android. Ini metode plug-and-play bagi pengguna tunanetra memiliki kemampuan untuk meningkatkan mobilitas pengguna.

2. Ultrasonic modul aksesori

sensor ultrasonik memberikan gelombang ultrasonik ke udara dan mengenali kembali ectedwaves fl fromobjects. Ini sensor ultrasonik berhubungan dengan mikrokontroler Arduino, dan mikrokontroler yang terkait dengan modul Bluetooth. Data dari sensor ultrasonik disusun terkait dengan modul Bluetooth [39]. Data dari sensor ultrasonik disusun terkait dengan modul Bluetooth [39]. Data dari sensor ultrasonik disusun dan beralih ke informasi speech (TTS) di themicrocontroller.

Hasil: Dari tabel diketahui bahwa aplikasi tersebut menunjukkan tingkat akurasi yang baik dari 90%. Sebagai beberapa pengguna tidak akrab dengan smartphone mereka fi nding beberapa kesulitan-fi dif dalam menggunakan aplikasi. Di antara pengguna, 75% dari mereka mendapati sistem untuk menjadi berguna. Untuk orang 5 dan 8, hasil menunjukkan bahwa tingkat akurasi yang tinggi. Hal ini karena fakta bahwa pengguna melihat langsung ke kamera tanpa

setiap de refleksi dalam ekspresi. Untuk orang 2 dan 6, tingkat akurasi relatif rendah. Hal ini karena gerakan wajah sehubungan dengan daerah menangkap kamera. Aplikasi yang diusulkan dibandingkan dan analyzedwith beberapa sistem yang ada dengan parameter tertentu seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2. Perlu dicatat bahwa aplikasi yang diusulkan menyediakan 95% deteksi hambatan dan 90% pengenalan wajah tarif akurasi dengan dukungan navigasi untuk kedua lingkungan outdoor dan indoor.

Kelebihan: Aplikasi yang diusulkan menyediakan 95% deteksi hambatan dan 90% pengenalan wajah tarif akurasi dengan dukungan navigasi untuk kedua lingkungan outdoor dan indoor. Dengan demikian, aplikasi yang diusulkan memberikan tingkat akurasi yang lebih tinggi untuk kedua deteksi hambatan dan pengenalan wajah tanpa mengorbankan portabel, lebih murah, karakteristik mandiri dari sistem.
Kekurangan: Kendala sensor ultrasonik adalah cari durasi sensor ultrasonik antara pemicu dan gema, Cari jarak menggunakan hubungan antara kecepatan suara dan durasi antara pemicu dan gema, kendala jika araknya kurang dari ambang batas jarak.

Perbandingan dengan Metode/Penelitian Usulan: Perbandingan metode yaitu paper ini menggunakan peralatan iot dan menggunakan ekstraksi wajah yaitu Open CV Library, berbeda dengan penelitian usulan saya yang menggunakan ekstraksi PCA untuk mendapatkan ciri/fitur dari citra wajah yang akan disegmentasi dengan background.

Nama : Doni Pramana
NIM : 192510013
Kelas : MM34B
Mata Kuliah : Metodologi Riset Keuangan
Dosen : Dr. Muji Gunarto, S.Si., M.Si.

A. Analisis Pengaruh Reputasi Auditor, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Leverage, Kepemilikan Manajerial, dan Proporsi Komite Audit Independen terhadap Manajemen Laba (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2004 - 2006)

B. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Praktik Manajemen Laba (Studi kasus : Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI)

No.	Keterangan	Persamaan	Perbedaan	
		A dan B	A	B
1	Variabel X (Independen)	Penelitian A dan B sama - sama menggunakan kepemilikan manajerial sebagai variabel X (independen)	Penelitian A menggunakan 6 variabel X (independen) yaitu reputasi auditor, proporsi dewan komisaris independen, leverage, kepemilikan manajerial, dan proporsi komite audit independen	Penelitian B menggunakan 4 variabel X (independen) yaitu Asimetri informasi, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, dan gender.
2	Variabel Y (dependen)	Penelitian A dan B sama - sama menggunakan manajemen laba sebagai variabel Y (dependen)	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Obyek Penelitian	Penelitian A dan B sama - sama menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Penelitian A menggunakan data dari tahun 2004 - 2006 (3 tahun)	Penelitian B menggunakan data dari tahun 2010 - 2013 (4 tahun)

4	Bentuk karya ilmiah	Penelitian A dan B sama - sama berbentuk karya ilmiah berupa Tesis	Penelitian A yaitu berbentuk Tesis yang diteliti oleh Edgina Antonia, S.E., program studi Manajemen dari Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2008	Penelitian B yaitu berbentuk Tesis yang diteliti oleh Puji Asih, program studi Akuntansi dari Universitas Mercu Buana, Jakarta, Tahun 2015
5	Hasil Penelitian	Penelitian A dan B sama - sama menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap Manajemen Laba	Penelitian A menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, leverage tidak signifikan berpengaruh terhadap manajemen laba, dan proporsi komite audit independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba	Penelitian B menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba, dan gender direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

ANALISIS PENGARUH BIAYA OPERASIONAL PENINGKATAN PELAYANAN AKADEMIK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA POLITEKNIK PARIWISATA PALEMBANG

PROPOSAL TESIS

Oleh :

ELIYUSMA HARTUTI

MANAJEMEN KEUANGAN

NIM : 192510047

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS BINA DARMA

PALEMBANG

2020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Identiikasi Masalah 3
1.3 Rumusan Masalah 4
1.4 Tujuan Penelitian 4
1.5 Manfaat Penelitian 4
1.6 Ruang Lingkup Penelitian 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 6
2.1 Biaya Operasional 6
2.2 Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan 10
2.3 Hubungan Biaya Operasional dan Kinerja Keuangan 19
2.4 Penelitian Terdahulu ..... .20
2.5 Kerangka Berpikir ..... .23
2.6 Hipotesis Penelitian ..... .24

BAB III METODELOGI PENELITIAN 25
3.1 Jenis Dan Lokasi Penelitian 25
3.2 Desain Penelitian 25
3.3 Metode Pengumpulan Data Penelitian 26
3.4 Instrumen Penelitian 27
3.5 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Penelitian..... 27

DAFTAR PUSTAKA 29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dibawah kepemimpinan Menteri Nadiem Makarim, bayak terobosan yang dilakukan. Termasuk terobosan di level pendidikan tinggi. Salah satu terobosan yang dilakukan pada level pergruan tinggi adalah tata kelola perguruan tinggi yang salah satunya adalah terkait akreditasi universitas dan akreditasi program studi.

Terkait dengan tata kelola perguruan tinggi yang paling disoroti adalah terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana belajar yang dimiliki oleh universitas. Sarana prasrana atau Fasilitas pendidikan meliputi semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan lancar, teratur, efektif, dan efisien sehingga mahasiswa dapat mencapai prestasi belajar yang optimal. Dalam jurnal Ginting (2005) mengatakan bahwa “Sarana dan prasarana pendidikan harus direncanakan dan diusahakan secara baik agar senantiasa siap pakai dalam proses belajar mengajar”. Kegiatan ini tercakup dalam bidang administrasi sarana dan prasarana pendidikan.

Sudah menjadi suatu tuntutan bahwa perguruan tinggi harus memiliki fasilitas belajar yang memadai dan dalam kondisi yang baik, hal ini bertujuan untuk menunjang jalannya proses belajar mengajar. Fasilitas yang baik dan bermutu akan meningkatkan mutu belajar dan pendidikan yang diperoleh para mahasiswa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab VII Standar Sarana dan Prasarana pasal 42

menyatkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboraturium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain/tempat berkreasi dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Fasilitas yang baik yang dimiliki oleh perguruan tinggi dalam rangka pelayanan yang terbaik bagi mahasiswa. Pelayanan yang baik merupakan cara perguruan tinggi untuk menggaet para calon mahasiswa untuk belajar di perguruan tinggi tersebut. Dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik pada mahasiswa banyak kompenen pembiayaan yang harus disiapkan dan dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Salah satu komponen pembiayaan yang harus dikeluarkan adalah biaya operasional. Biaya operasional yang daimaksud terkait dengan biaya variabel dan biaya semi-variabel.

Menurut Mansyur (2011) Biaya variabel ialah biaya yang jumlahnya berubah ubah secara proporsional dengan berubahnya volume produksi. Artinya jika terjadi peningkatan volume produksi maka biaya variabel akan mengalami peningkatan, begitu pula sebaliknya. Yang termasuk biaya variabel antara lain bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya listrik. Biaya semi-variabel, ialah biaya yang sebagian mempunyai sifat tetap yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan dan sebagian lagi mempunyai sifat

variabel yang besar kecilnya dipengaruhi oleh perubahan perusahaan. Yang termasuk biaya semi-variabel antara lain insentif dan biaya pemeliharaan.

Demi menjaga stabilitas keuangan di Politeknik Pariwisata Palembang, maka perlu diadakan suatu penilaian kinerja keuangan, untuk dibandingkan dengan kinerja periode lalu. Setelah melakukan perbandingan, mencari permasalahan kemudian mencarikan solusinya. Selanjutnya dilakukan perencanaan tentang apa yang akan dilakukan sehingga kinerja keuangan akan terus membaik.

Penilaian kinerja keuangan sangat penting pada setiap perusahaan maupun instansi/lembaga baik swasta maupun pemerintahan. Dengan menganalisis laporan keuangan maka dapat diketahui posisi kinerja keuangan instansi tersebut berada pada keadaan yang baik, kurang baik atau tidak baik. Selain itu, dengan menganalisis laporan keuangan, pihak manajemen dapat mengambil tindakan dan kebijakan untuk menjaga posisi perusahaan/instansi agar tetap berada pada kondisi yang aman.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis berminat untuk mengetahui dan meneliti ”Analisis Pengaruh Biaya Operasional Peningkatan Pelayanan Akademik Terhadap Kinerja Keuangan Pada Politeknik Pariwisata Palembang”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pengamatan, wawancara dan pengalaman yang ada, dapat di identifikasikan sejumlah masalah keuangan yang terjadi di Politeknik Pariwisata Palembang. Permasalahan tersebut antara lain :

1. Adanya peningkatan belanja untuk biaya operasional untuk peningkatan pelayanan akademik pada setiap tahun anggaran sering kali mempengaruhi laporan keuangan.
2. Terjadi fluktuasi nilai return of asset (ROA) tiap tahun di Politeknik Pariwisata Palembang, yang salah satu penyebabnya adalah perbedaan biaya operasional setiap tahun anggaran yang membebani keuangan Lembaga Politeknik.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah Biaya Operasional Peningkatan Pelayanan Akademik Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pada Politeknik Pariwisata Palembang?.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Biaya Operasional Peningkatan Pelayanan Akademik Terhadap Kinerja Keuangan Pada Politeknik Pariwisata Palembang.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua kegunaan sekaligus, yaitu:

1. Kegunaan teoritis, yaitu sebagai tambahan referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya bidang manajemen keuangan.

2. Kegunaan praktis, yaitu memberikan informasi kepada pimpinan di Politeknik atau lembaga pendidikan lainnya akan pengaruh dari Biaya Operasional Peningkatan Pelayanan Akademik Terhadap Kinerja Keuangan.

1.6. Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup yang akan dibahas dan diungkap dalam peneliti ini, yaitu ingin mengetahui bagaimana pengaruh Biaya Operasional Peningkatan Pelayanan Akademik Terhadap Kinerja Keuangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Biaya Operasional

2.1.1. Pengertian Biaya

Biaya adalah suatu kontra prestasi yang diberikan oleh perusahaan atas sesuatu yang telah diterimanya dari pihak lain atau jasa-jasa yang telah diterimanya dari pihak lain (Munandar, 2007:23). Biaya merupakan pengorbanan atau pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan untuk memeroleh manfaat lebih dari aktifitas yang dilakukam tersebut. Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi, yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi.

Biaya terbagi menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang terlihat secara fisik, misalnya berupa uang. Sementara itu, yang dimaksud dengan biaya implisit adalah biaya yang tidak terlihat secara langsung, misalnya biaya kesempatan dan penyusutan barang modal (Wikipedia, 2013). Biaya dalam arti luas adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu (Nurngaini, 2013).

2.1.2. Klasifikasi Biaya

Biaya muncul karena adanya suatu kegitan yang terjadi dalam kegiatan operasional perusahaan. Banyak kegiatan terjadi dalam perusahaan sehingga

banyak klasifikasi biaya. Dipandang dari sudut hubungannya dengan usaha perusahaan, biaya dapat dibedakan menjadi dua sektor, yaitu:

a. Subsektor Biaya Utama

Subsektor biaya utama ialah biaya yang menjadi beban tanggungan perusahaan dan berhubungan erat dengan usaha utama atau usaha pokok perusahaan. Biaya utama dikelompokkan menjadi tiga berdasarkan tempat biaya tersebut terjadi, yaitu:

1) Biaya Produksi *(Production Cost)* : Biaya produksi *(production cost)* adalah semua biaya yang terdapat di dalam lingkungan atau ruang tempat kegiatan produksi. Biaya produksi dibedakan menjadi tiga komponen, yakni sebagai berikut:
    a) Biaya bahan mentah *(raw materials) :* nilai dari semua bahan yang diolah dalam proses produksi.
    b) Upah tenaga kerja langsung *(direct labour)*, ialah upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja yang ditugasi mengolah bahan mentah dalam proses produksi.
    c) Biaya pabrik tidak langsung *(factory overhead)* ialah semua biaya yang terjadi dan terdapat di dalam lingkungan pabrik, tetapi tidak secara langsung berhubungan dengan proses kegiatan.
2) Biaya Administrasi *(Administration Expenses)* : Biaya administrasi (administration expenses) ialah semua biaya yang terdapat di dalam lingkungan dimana kegiatan administrasi dilakukan.
3) Biaya Pemasaran *(Marketing Expenses) :* Biaya pemasaran *(marketing expenses)* ialah semua biaya yang terdapat di dalam lingkungan dimana pemasaran dilakukan.

b. Subsektor Bukan Utama

Subsektor biaya bukan utama ialah biaya yang menjadi beban tanggungan perusahaan, yang tidak berhubungan erat dengan usaha utama atau usaha pokok perusahaan (Mansyur, 2011:15-16).

2.1.3. Pengertian Biaya Operasional

Biaya operasional adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama kegiatan operasi perusahaan dalam jangka waktu satu tahun periode akuntansi. Mulyadi mengemukakan pengertian biaya operasional sebagai biayabiaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Contohnya adalah biaya depresiasi mesin, equipmen, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya gaji karyawan yang bekerja dalam bagianbagian baik yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan proses produksi (Anas, 2014).

Dalam Laman Ilmu ekonomi (2013) dinyatakan bahwa biaya operasional adalah keseluruhan biaya-biaya komersil yang dikeluarkan untuk menunjang atau mendukuna kegiatan atau aktivitas perusahaan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Biaya operasional adalah biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan proses kegiatan operasional perusahaan dalam usahanya mencapai tujuan perusaaan yang lebih maksimal.

Dalam Kamus Bisnis dan Bank (2014) dinyatakan bahwa biaya operasional adalah *operating expenses* yaitu biaya berupa pengeluaran uang untuk melaksanakan kegiatan pokok, yaitu berupa biaya penjualan dan administrasi untuk memperoleh pendapatan, tidak termasuk pengeluaran yang telah diperhitungkan dalam harga pokok penjualan dan penyusutan.

2.1.4. Jenis Biaya Operasional

Pada umumnya biaya operasional terbagi atas tiga, yaitu : biaya tetap, biaya variabel dan biaya semi variabel. Pertama biaya tetap, ialah biaya yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh perubahan aktivitas perusahaan. Ini berarti terjadi peningkatan atau penurunan aktivitas perusahaan, maka biaya tetap tidak mengalami perubahan. Contoh biaya operasional tetap adalah gaji bulanan karyawan (Sasongko dan Parulian, 2010:86).

Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah secara proporsional dengan berubahnya volume produksi. Artinya jika terjadi peningkatan volume produksi maka biaya variabel akan mengalami peningkatan, begitu pula sebaliknya. Contoh biaya operasional variabel adalah komisi penjualan untuk wiraniaga (*salesperson*). Besar atau kecilnya komisi penjualan yang harus dibayar oleh perusahaan dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya tingkat penjualan perusahaan. Semakin tinggi tingkat penjualan perusahaan, maka semakin tinggi pula komisi penjualan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada wiraniaganya (Sasongko dan Parulian, 2010:87).

Komponen biaya yang ketiaga adalah biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang sebagian mempunyai sifat tetap yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan dan sebagian lagi mempunyai sifat variabel yang besar kecilnya dipengaruhi perubahan perusahaan (Mansyur, 2011:17). Contoh biaya operasional semi variabel antara lain insentif dan pemeliharaan.

Perencanaan keuangan akan menjadikan sebuah perusahaan berhati-hati dalam mengeluarkan biaya untuk kegiatan operasionalnya. Perencanaan keuangan adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk

mencapai suatu tujuan yang dikehendaki dengan manajemen keuangan (perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, serta pengendalian).

2.2. Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan

2.2.1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan. Laporan keuangan merupakan informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial (Fahmi, 2012:22).

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memeroleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan (Munawir, 2002:56). Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu perode tertentu (Kasmir, 2010:70). John Wild (2004:3) mengemukakan bahwa *"Financial statement analysis applies analytical tools and techniques to general purpose financial statements and related data to derives estimates and inferences useful business decision*".

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan keadaan keuangan perusahaan pada periode tertentu berdasarkan pada prinsip akuntansi.

2.2.2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angkaangka dalam satuan moneter. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (Siegel, dkk, 2019:477).

Laporan keuangan ditujukan sebagai pertanggungjawaban manajemen atas sumberdaya yang dipercayakan kepada pemilik perusahaan atas kinerja yang telah dicapainya, serta merupakan laporan akuntansi utama yang mengomunikasikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam membuat analisis ekonomi dan peramalan untuk masa yang akan datang (Fahmi, 2012:26-27).

Analisis laporan keuangan akan membuka kesalahan proses akuntansi seperti : kesalahan pencatatan, kesalahan pembukuan, kesalahan jumlah, kesalahan perkiraan, kesalahan posting, kesalahan jurnal. Kesalahan lain yang disengaja, misalnya tidak mencatat, pencatatan harga yang tidak wajar, menghilangkan data, income *smoothing*, dan lain sebagainya (Harahap, 2001:193).

Dari penjelasan di atas tentang tujuan laporan keuanagn terlihat bahwa laporan keuangan akan memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan unsur-unsur laporan keuangan. Juga laporan keuangan akan memberikan informasi keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan.

Menurut Fahmi (2012:30) bahwa ada beberapa pihak yang dianggap memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan, yaitu :

a. Kreditur

Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman baik dalam bentuk uang, (*money*), barang (*goods*) maupun dalam bentuk jasa (*service*). Pada saat pihak debitur mengajukan permohonan untuk meminjam sejumlah dana kepada kreditur, maka sudah menjadi kewajiban bagi pihak kreditur untuk melakukan pengecekan terhadap laporan keuangan pihak debitur karena dengan melihat dan meneliti setiap laporan keuangan tersebut pihak kreditur akan dapat memberikan rekomendasi apakah usulan untuk pinjaman tersebut layak untuk direalisasikan dan jika layak beberapa angka yang harus direalisasikan. Bagi pihak kreditur ini menyangkut dengan kemampuan bagi pihak debitur untuk mampu mengembalikan pinjaman tersebut tepat pada waktunya.

b. Investor

Seorang investor berkewajiban untuk mengetahui secara dalam kondisi perusahaan dimana investor akan berinvestasi karena dengan memahami laporan keuangan perusahaan.

c. Akuntan Publik

Akuntan *public* adalah orang yang ditugaskan untuk melakukan audit pada sebuah perusahaan. Dan yang menjadi bahan audit seorang akuntan *public* adalah laporan keuangan perusahaan, untuk selanjutnya pada hasil audit akan melaporkan dan memberikan penilaian dalam bentuk rekomendasi. Bagi sebuah perusahaan yang akan *go public* tanggung jawab seorang auditor menjadi lebih berat karena dengan penilaiannya sebuah perusahaan bisa atau tidak dinyatakan laporan keuangannya memenuhi syarat untuk *go public.*

d. Karyawan Perusahaan

Karyawan merupakan orang yang terlibat secara penuh di suatu perusahaan. Secara ekonomi karyawan mempunyai ketergantungan yang besar yaitu pekerjaan dan penghasilan yang diterima dari perusahaan. Dengan begitu, posisi perusahaan yang tergambarkan dalam laporan keuangan menjadi bahan kajian bagi para karyawan memosisikan keputusan kedepan nantinya.

e. BAPEPAM

BAPEPAM adalah Badan Pengawas Pasar Modal. Bapepam bertugas untuk mengamati dan mengawasi setiap kondisi perusahaan yang *go public* termasuk berkewajiban untuk menerima dan mengeluarkan perusahaan yang dianggap sudah tidak layak lagi untuk *go public*.

f. Underwriter

Underwriter adalah penjamin emisi bagi setiap perusahaan yang akan menerbitkan sahamnya di pasar modal.

g. Pemasok

Pemasok *(supplier)* merupakan orang yang menerima order untuk memasok setiap kebutuhan perusahaan mulai dari hal-hal yang dianggap kecil sampai yang besar yang mana semua itu dihitung dengan skala finansial. Pelunasan atas barang yang dipasok bayaran atau pelunasannya dilakukan dalam kurun waktu tertentu, setiap per semester atau setiap akhir tahun. Hal ini yang menyebabkan *supplier* harus melakukan tindakan analisis yang mendalam dan penuh dengan kehati-hatian menyangkut dengan kondisi keuangan perusahaan.

h. Lembaga Penilai

Lembaga penilai disini berasal dari berbagai latar belakang seperti GCG

(Good Corporate Governance), WALHI (Wahana Lingkungan Hidup), majalah, televisi, tabloid, surat kabar, dan lainnya yang secara berkala membuat rangking perusahaan berdasarkan klasifikasi masing-masing.

i. Asosiasi Perdagangan

Asosiasi perdagangan ini seperti KADIN (Kamar Dagang dan Industri). Organisasi tersebut menaungi berbagai perusahaan yang menjadi anggotanya dan setiap waktunya diadakan berbagai hal yang menjadi hambatan dalam aktifitas bisnis yang dijalankan dan tidak terkecuali seperti terjadinya penurunan angka penjualan.

j. Pengadilan

Laporan keuangan yang dihasilkan dan disahkan oleh pihak perusahaan adalah dapat menjadi barang bukti pertanggungjawaban kinerja keuangan, dan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan tersebut nantinya akan menjadi subjek pertanyaan dalam pengadilan.

k. Akademis dan Peneliti

Pihak akademis dan peneliti adalah mereka yang melakukan *research* terhadap sebuah perusahaan. Sehingga dengan begitu kebutuhan akan informasi sebuah laporan keuangan yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan adalah mutlak, apalagi jika nanti penelitian tersebut dipublikasikan ke berbagai jurnal dan media massa baik nasional dan internasional.

l. Pemda

Pemerintah Daerah atau *local government* adalah orang yang mampunyai hubungan kuat dengan kajian seperti akan lahirnya perda (peraturan daerah). Sudah menjadi kewajiban bagi pihak perusahaan untuk

menginformasikan secara akurat tentang keadaan perusahaan khususnya laporan keuangan kepada pihak pemerintah daerah. Dampak dari tidak baiknya kinerja perusahaan akan berpengaruh pada timbulnya dampak sosial.

m. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat adalah dengan segala perangkat yang dimilikinya telah menjadikan laporan keuangan perusahaan sebagai data fundamental acuan untuk melihat perkembangan pada berbagai sektor bisnis.

n. Pemeintah Asing

Pemerintah asing merupakan pihak yang mengamati perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu negara, dimana suatu negara memiliki keterkaitan dalam bentuk perjanjian dagang *(trade contract)*.

o. Organisasi Inetrnasional

Organisasi internasional akan memberikan dukungan baik financial ataupun non financial yang diberikan akan didasarkan pada laporan keuangan pihak atau perusahaan yang memerlukan.

2.2.3. Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan terdiri dari beberapa jenis, tergantung maksud dan tujuan pembuatan laporan keuangan tersebut. Masing-masing laporan keuangan memiliki arti sendiri dalam melihat kondisi keuangan perusahaan, baik secara bagian, maupun secara keseluruhan. Secara umum, laporan keuangan terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

a. Neraca

Neraca (*balance sheet*) adalah Laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (Kasmir, 2010:28). Neraca adalah ringkasan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu yang menunjukkan total aktiva dengan total kewajiban ditambah total ekuitas pemilik (Horne, dkk, 2010:193). Dalam neraca ada beberapa kompenen yaitu aktiva, kewajiban atau yang sering disebut utang, dan komponen terakhir adalah ekuitas (modal).

b. Aktiva

Aktiva adalah Harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik pada saat tertentu maupun periode tertentu. Klasifikasi aktiva terdiri atas aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya (Kasmir, 2010:39). Aktiva lancar adalah harta atau kekayaan yang segera dapat diuangkan (ditunaikan) pada saat dibutuhkan dan paling lama satu tahun. Aktiva tetap adalah harta atau kekayaan perusahaan yang digunakan dalam jangka panjang lebih dari satu tahun. Aktiva lainnya merupakan harta atau kekayaan yang tidak dapat digolongkan ke dalam aktiva lancar dan aktiva tetap, seperti bangunan dalam proses.

c. Kewajiban

Kewajiban (utang) menurut Keown adalah Sumber pembiayaan dari kredit oleh para penyalur atau suatu pinjaman dari bank (Keown, 2004:37). Kewajiban digolongkan menjadi kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang (Soemarso, 2004:230). Kewajiban lancar adalah kewajiban-kewajiban yang akan jatuh tempo dalam satu tahun atau dalam satu siklus kegiatan normal perusahaan.Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

d. Ekuitas

Modal (ekuitas) merupakan hak yang dimiliki perusahaan (Kasmir, 2010:44). Ekuitas merupakan investasi pemegang saham pada perusahaan dan laba kumulatif yang ditahan di dalam bisnis samapai tiba waktu neraca laba rugi dikeluarkan.

e. Laporan Laba Rugi

Ringkasan dari pendapatan dan biaya perusahaan selama periode waktu tertentu, diakhiri dengan laba bersih atau rugi bersih untuk periode tertentu (Horne, dkk, 2010:193). Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi meliputi (Mansyur, 2011:23), yaitu:

1) Jenis-jenis pendapatan yang diperoleh dalam satu periode.
2) Jumlah rupiah dari masing-masing jenis pendapatan .
3) Jumlah keseluruhan pendapatan.
4) Jenis-jenis biaya atau beban dalam satu periode.
5) Jumlah rupiah masing-masing biaya atau beban.
6) Jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan.

Hasil usaha yang diperoleh dengan mengurangi jumlah pendapatan dan biaya selisihnya disebut laba atau rugi.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan modal merupakan Laporan yang menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini serta sebab-sebab berubahnya modal (Kasmir, 2010:59). Infromasi yang diberikan dalam laporan perubahan modal meliputi (Mansyur, 2011:22), yaitu:

1) Jenis-jenis dan jumlah modal yang ada saat ini.
2) Jumlah rupiah tiap jenis modal.

3) Jumlah rupiah modal yang berubah.

4) Sebab-sebab berubahnya modal.

5) Jumlah rupiah modal sesudah perubahan.

g. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk (pendapatan) dan arus kas keluar (biaya-biaya). Laporan arus kas mendeskripsikan tentang kas masuk dan kas keluar perusahaan pada periode tertentu.

2.2.4. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturanaturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012:2). Kinerja keuangan adalah prestasi kerja yang telah dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu dan tertuang pada laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan (Rahayu, 2010:15).

Kinerja keuangan ialah hasil kegiatan operasi perusahaan yang disajikan dalam bentuk angka-angka keuangan (Darsono, 2009:47). Menurut Fahmi (2012:3-4), ada 5 (lima) tahap dalam menganalisis kinerja keuangan secara umum, yaitu:

a. Melakukan review terhadap data laporan keuangan. review disini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah dibuat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

b. Melakukan perhitungan. Penerapan metode perhitungan disini adalah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan yang sesuai dengan analisis yang diinginkan.
c. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan terhadap hasil yang telah diperoleh. Dari hasil hitungan yang telah diperoleh tersebut kemudian dilakukan perbandingan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lainnya. Metode yang paling umum dipergunakan untuk melakukan perbandingan ini ada dua, yaitu : Pertama *Time series analysis*, yaitu membandingkan secara antarwaktu atau antar periode, dengan tujuan itu nantinya akan terlihat secara grafik. Kedua *Cross sectional approach*, yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis yang dilakukam secara bersamaan.
d. Melakukan penafsiran *(interpretation)* terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.
e. Mencari dan memberikan pemecahan masalah terhadap permaslahan yang ditemukan.

2.3. Hubungan Biaya Operasional dan Kinerja Keuangan

Tingginya biaya operasi akan membuat peningkatan laba turun, begitu juga jika nilai biaya operasi rendah peningkatan laba akan naik (Juki, 2008). Peningkatan laba merupakan salah satu tujuan berdirinya sebuah perusahaan. Untuk mendapatkan laba maka perusahaan akan menggunakan biaya secara optimal (Nasution dan Marlina, 2012).

Hubungan antara biaya operasional dan laba bersih dapat dilihat pada laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi, terdapat ringkasan dari pendapatan dan biaya perusahaan selama periode waktu tertentu, diakhiri dengan laba bersih atau rugi bersih untuk periode tertentu (Horne, dkk, 2010:193). Laba bersih (*net income*) didapatkan selisih lebih semua pendapatan dan keuntungan terhadap semua biaya biaya kerugian (Soemarso, 2005:235). Laba bersih didalamnya terdapat selisih antara semua pendapatan dan biaya.

2.4. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian pernah dilakukan yang terkait dengan variabel-variabel dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang terkait dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu yang Terkait

No	Judul	Peneliti, Tahun	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013	Puput Rizky Pramita, 2015	▪ Kinerja Keuangan Daerah, ▪ Rasio Efektivitas PAD ▪ Rasio Efisiensi Keuangan Daerah ▪ Rasio Keserasian ▪ Rasio Pertumbuhan ▪ Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecah	▪ Rasio Efektivitas PAD dapat dikategorikan Efektif, karena rata-rata efektivitasnya sebesar 104,46%. ▪ Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tergolong Efisien karena rata-rata besarnya rasio ini

				kan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian.	sebesar 99,82%. ▪ Rasio Keserasian dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk belanja operasi daerah yaitu rata-rata sebesar 80,97% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 16,68%. ▪ Rasio Pertumbuhan pendapatan, PAD, Belanja Operasi selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan Pertumbuhan Belanja Modal fluktuatif. ▪ Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

					masih tergolong Rendah Sekali dan dalam kategori pola hubungan Instruktif karena rata-rata rasionya sebesar 7,80%.
2	Pengaruh Pengelolaan Dana, Promosi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah BMT Kube Sejahtera Surakarta	Suranto, 2017	▪ pengelolaan dana ▪ promosi ▪ kualitas layanan ▪ loyalitas	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisis regresi	▪ ada pengaruh pengelolaan dana terhadap loyalitas ▪ ada pengaruh promosi terhadap loyalitas ▪ ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas ▪ ada pengaruh yang signifikan antara pengelolaan dana, promosi, dan kualitas layanan secara bersama-sama terhadap loyalitas nasabah di BMT Kube Sejahtera Surakarta.

2.5. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini merupakan arah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan tergambar dalam skema sebagai berikut:

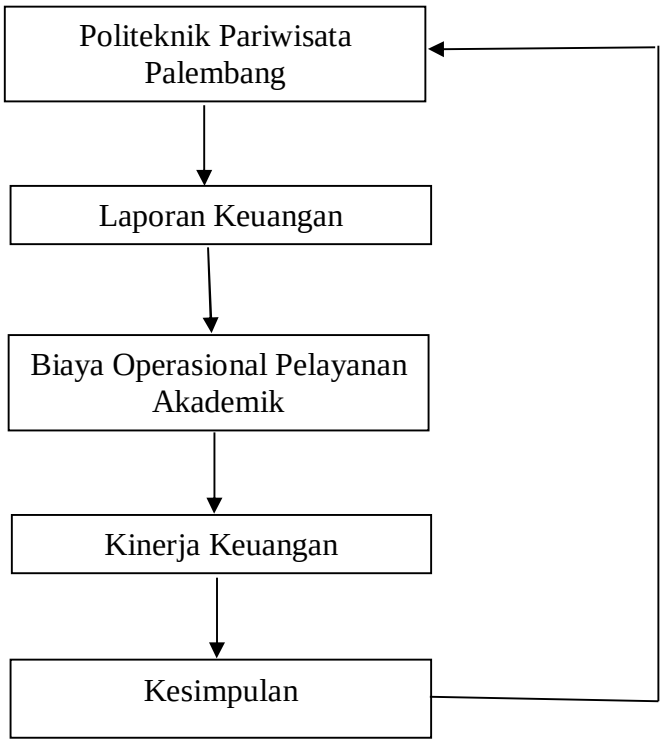

Gambar 2.1 : Kerangka Berpikir Penelitian

keuangan yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi berpengaruh besar terhadap kinerja keuangan. Laporan laba rugi dibedakan beberapa jenis, diantaranya adalah biaya operasional. Hubungan biaya operasional terhadap kinerja keuangan yaitu besar kecilnya nilai dari kinerja keuangan (ROA) dipengaruhi oleh nilai dari biaya operasional. Semakin besar biaya operasional perusahaan maka semakin banyak nilai pengurang pada pendapatan yang mengakibatkan nilai laba bersih ikut menurun, begitu juga sebaliknya. Jika biaya operasional lebih sedikit dari pendapatan maka nilai ROA juga akan semakin

baik (Mansyur, 2011:61). Peneliti akan menganalisis pengaruh biaya operasional untuk pelayanan akademik terhadap kinerja keuangan pada Politeknik Pariwisata Palembang.

2.7. Hipotesis Penelitian

Pada penelitian ini hipotesis yang diajukan, yaitu diduga bahwa biaya operasional pelayanan akademik berpengaruh terjadap kinerja keuangan pada Politeknik Pariwisata Palembang.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Lokasi Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunaan rancangan penelitian yang berbentuk studi pengaruh, yaitu untuk mengetahui pengaruh biaya operasional terhadap kinerja keuangan.

3.1.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Politeknik Pariwisata Palembang, yang beralamat di Komplek Jakabaring Sport City, jalan Sapta Pesona Nomor 10 Kecamatan Silabranti Kota Palembang.

3.2. Desain Penelitian

Desain dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif menganalisa angka-angka data penelitian. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan - hubungan kuantitatif (Johrudin, 2013).

3.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, selain harus tepat dalam meilih metode penelitian, teknik pengumpulan data penelitian juga harus tepat. Teknik dan alat pengumpulan data penelitian harus relevan dengan data penelitian yang akan dianalisis. Penggunaan teknik dan alat pengumpulan data dapat memungkinkan diperolehnya data yang objektif. Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan pada penelitian ini berupa teknik kepustakaan, teknik lapangan, observasi, dan dokumentasi.

a. Teknik Kepustakaan

Teknik kepustakaan *(library research)*, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca berbagai buku literatur yang berhubungan dengan pembahasan tesis ini.

b. Teknik Lapangan

Teknik lapangan *(field research)*, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian (Usman, 2013:38).

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalah cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan (Arikunto, 2010: 231). Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian seperti catatan, arsip, rencana penggunaan anggaran, laporan keuangan bulanan dan tahunan.

3.4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumentasi dan studi pustaka. Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2010:158).

Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dan lain-lain).

3.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data pada penelitian ini akan diolah dengan menggunakan *software* SPSS, kemudian dianalisis dengan :

a. Analisis Keuangan

Analisis keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis rasio profitabilitas dan analisis profitabilitas yang digunakan adalah *Return on Asset (ROA).* ROA merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan (Mansyur, 2011:37). Rumus untuk mencari pengembalian atas asset (ROA) sebagai berikut:

$$ROA = \frac{Laba\ setelah\ bunga\ dan\ pajak}{Total\ Aktiva}$$

Pengembalian atas total aktiva merupakan ukuran efisiensi operasi yang relavan. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik. Standar ROA yang baik adalah di atas 2%.

b. Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi sederhana digunakan untuk menguji hubungan pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat, dengan rumus:

$$Y = \alpha + \beta X$$

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan

X = Biaya Operasional

β = Koefisien Regresi

α = Konstanta

DAFTAR PUSTAKA

Anas, Nanang Budi. 2014. Pengertian dan Jenis Biaya Operasional". *Blog Nanang Budi Anas.* http://nanangbudianas.blogspot.com/2013/02/ pengertian-danjenis-biaya-operasional.html (17 Januari 2014)

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.

Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan.* Bandung: ALFABETA.

Ginting, Vera. 2005. *"Penguatan Membaca, Fasilitas Lingkungan Sekolah dan Keterampilan Dasar Membaca Bahasa Indonesia serta Minat Baca Murid"*. Dalam Jurnal Pendidikan Penabur.

Harahap, Sofyan Syafari. 2001. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan* . Cet.Pertama; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

-------. 2001. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Peneribit Raja Grafindo Persada.

Horne, James C Van dkk. 2010. *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan* (Edisi keduabelas; Jakarta: Salemba Empat).

Ilmu Ekonomi. 2013. "Biaya Operasional". *Situs Resmi Ilmu Ekonomi*. http://www.ilmu-ekonomi.com/2011/09/biaya-operasional.html 7 Januari 2013).

John, Wild, dkk. 2004. *Financial Statement Analiysis, Theory, Aplication, and Interpretation* (Sixth Edition; Hillls: Irwin McGraw).

Johruddin, Udin. 2013. *Penelitian Kuantitatif (Quantitative Inquiry).* https://atcontent.com/Publication/869593868562999il.text/-/PenelitianKuantitatif-%28Quantitative-Inquiry%29. (Diakses 5 Januari 2013).

Juki, Umar. 2008. "Pengaruh Biaya Operasional terhadap Profitabilitas pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)". *Skripsi* (Jurusan IESP, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Diponegoro.

Kamus Bisnis dan Bank. "Biaya Operasional" *Situs Resmi Media BPR*. http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/biaya_operasional.aspx (17 Januari 2014).

Kasmir. 2010. *Analisis Laporan Keuangan* . Jakarta: Rajawali Pers.

Keown, Arthur J. *Manajemen Keuangan: Prinsip-prinsip dan Aplikasi.*Jakarta: Indeks. 2004.

Mansyur, Anwar. 2011. "Analisis Pengaruh Anggaran Biaya Operasional dan Anggaran Pendapatan Terhadap Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio

Return on Asset (ROA) Pada PT PLN (Persero) Pusat" *Skripsi*. Makassar: Fak. Ekonomi Universitas Hasanuddin.

Munandar, M. 2007. *Budgeting: Perencanaan Pengkoordinasian dan Pengawasan Kerja*. Edisi Kedua; Yogyakarta : BPFE.

Munawir. 2002. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.

Nurngaini, Siti. 2013. *Akuntansi Biaya dan Pengertian Biaya*. http://www.slideshare.net/jhumanangshare/akuntansi-biaya-danpengertian-biaya (20 Desember 2013).

Peraturan Pemerintah. 2005. PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Sasongko, C. dan Safrida Rumondang Parulian. 2010. *Anggaran*. Jakarta: Salemba Empat.

Siegel, Joel G dan Jae K. 2019. *Kamus Istilah Akuntansi*. Jakarta: Eleks Media Komputindo.

Soemarso. 2004. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi kelima buku 1; Jakarta: Salemba Empat.

Rahayu, Sri. 2010. "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Usman. 2013. "Pengaruh Rekruitmen Dan Seleksi Terhadap Kualitas Tenaga Kerja pada Pt. Bank Sulselbar Makassar". *Skripsi.* Makassar*:* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin.

Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. 2013. "Biaya" http://id.wikipedia.org/wiki/Biaya diakses pada : 25 November 2013.

TUGAS 1

2 Buah Jurnal Yang Saling Terkait

No	Penulis, Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Lastanti & Salim, (2018)	Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan	1. Variabel pengungkapan CSR berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 2. Variabel GCG dengan proksi kepemilikan manajemen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 3. Variabel GCG dengan proksi kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 4. Variabel GCG dengan proksi proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 5. Variabel GCG dengan proksi ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 6. Variabel GCG dengan proksi untuk

			komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 7. Variabel kinerja keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
2	Siallagan & Machfoedz, (2006)	Mekanisme Corporate Governance Kualitas Laba Dan Nilai Perusahaan	1. Mekanisme corporate governance mempengaruhi kualitas laba. 2. Kepemilikan manajerial secara positif berpengaruh terhadap kualitas laba. 3. Kualitas laba secara positif berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 4. Mekanisme corporate governance berpengaruh terhadap nilai perusahaan. - kepemilikan manajerial secara negatif berpengaruh terhadap nilai perusahaan. - dewan komisaris secara positif berpengaruh terhadap nilai perusahaan - komite audit secara positif berpengaruh pada nilai perusahaan 5. Kualitas laba bukan merupakan variabel pemediasi pada hubungan antara mekanisme

			corporated governance dan nilai perusahaan.

Perbedaan dan Persamaan dari Dua Buah Jurnal

Variabel	**Lastanti & Salim, (2018)**	**Siallagan & Machfoedz, (2006)**
1. CSR	√	×
2. GCG dengan proksi Kepemilikan Manajerial	√	√
3. GCG dengan proksi Kepemilikan Institusional	√	×
4. GCG dengan proksi Dewan Komisaris	√	√
5. GCG dengan proksi Ukuran Dewan Direksi	√	×
6. GCG dengan proksi Komite Audit	√	√
7. Kinerja Keuangan	√	√
8. Nilai Perusahaan	√	×
9. Kualitas Laba	×	√

Keterangan :

√ menunjukan Persamaan

× menunjukan Perbedaan

Carilan 2 buah journal yang saling terkait. lakukan analisis terhadap persamaan dan perbedaaan dari kedua artikel tersebut!

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan - Arja Sadjiarto	1) Menetapkan sasaran dan tujuan program tertentu 2) Merencanakan program kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut 3) Mengalokasi sumber daya untuk pelaksanaan program 4) Memonitor dan mengevaluasi results untuk menentukan apakah ada kemajuan yang diperoleh dalam mencapai sasaran dan tujuan tersebut 5) Memodifikasi perencanaan program untuk meningkatkan kinerja	pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinirja pemerintahan	Pengukuran kinerja dikelompokkan dalam tiga kategori indikator, yaitu 1) Indicator pengukuran service efforts, 2) Indikator pengukuran service accomplishment, dan 3) Indikator yang menghubungkan antara efforts dengan accomplishment.
2.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Darwanis dan Sephi Chairunnisa	1) Penerapan akuntansi keuangan daerah, pengawasan kualitas laporan keuangan, dan kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Aceh. 2) Penerapan akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Aceh. 3) Pengawasan kualitas laporan keuangan	pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinirja pemerintahan	Analisis Regresi Linear Berganda 1) Uji Validitas 2) Uji Reliabilitas

		berpengaruh secara terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Aceh. 4) Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Aceh.		

PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi pada PT. Macanan Jaya Cemerlang Klaten)

THE EFFECT OF WORK DISCIPLINE AND WORK MOTIVATION TOWARD WORK-PERFORMANCE (A study for Employee of PT. Macanan Jaya Cemerlang Klaten)

Oleh: **Rika Widayaningtyas**
Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
Email: Rika.widyanegara@gmail.com
Arum Darmawati, SE.,MM
Dosen Jurusan Manajemen Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh disipli kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang Klaten. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal menggunakan pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian adalah karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang Klaten sebanyak 120 orang. Data dikumpulkan dengan kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja dan motivasi kerja mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan.

Kata kunci: Disiplin kerja, Motivasi kerja, Kinerja karyawan

Abstract

The study aimed to find out the effect of work discipline and work motivayion toward work-performance for the employee of PT. Macanan Jaya Cemerlang Klaten. This study was a causal associative quantitative approach. The number of subjects are 120 employees of PT. Macanan Jaya Cemerlang Klaten. Data were collected by a questionnaire and analyzed using multiple regression analysis. The results showed that work discpline and work motivation had a positive effect on employee work-performance.

Keywords: Work discipline, Work Motivation, Employee Work-Performance

PENDAHULUAN

Manajemen sumber daya manusia (SDM) memiliki kewajiban untuk membangun perilaku kondusif karyawan. Selain itu, manajemen SDM juga memiliki tugas untuk menciptakan kinerja terbaik bagi perusahaan dan karyawan. Menurut Setiyawan dan Waridin (2006:126) kinerja karyawan merupakan hasil atau prestasi kerja karyawan yang dinilai dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang ditentukan oleh pihak organisasi. Kinerja yang baik adalah kinerja yang optimal, yaitu kinerja yang sesuai standar organisasi dan mendukung tercapainya tujuan organisasi. Organisasi yang baik adalah organisasi yang berusaha meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya, karena hal tersebut merupakan faktor kunci untuk meningkatkan kinerja karyawan.

Kualitas dan kuantitas produk/jasa sangat tergantung pada sumber daya yang ada pada perusahaan. Upaya peningkatan kinerja perusahaan tidak hanya mengandalkan pada mesin modern, modal dan bahan baku. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah faktor tenaga kerja, yang dalam hal ini adalah manusia. Upaya untuk meningkatkan hasil yang maksimal untuk perusahaan adalah dengan meningkatkan kinerja karyawan. Dengan peningkatan tersebut, maka diharapkan kinerja karyawan dapat tercapai dengan efisiensi dan efektif.

Karyawan memegang peran utama dalam menjalankan roda kehidupan perusahaan. Apabila karyawan memiliki produktivitas dan motivasi kerja yang tinggi, maka laju roda akan berjalan kencang dan pada akhirnya akan menghasilkan kinerja dan pencapaian yang baik bagi perusahaan. Namun

sebaliknya, jika karyawan bekerja tidak produktif dan tidak memiliki semangat kerja yang tinggi, tidak ulet dalam bekerja dan memiliki moril yang rendah maka dapat menurunkan performa perusahaan.

Kinerja karyawan ditentukan oleh seberapa baik pengetahuan yang dimiliki karyawan. Lebih lanjut untuk menghasilkan kinerja yang baik, maka perusahaan membutuhkan sistem yang baik pula. Sistem ini bukan hanya peraturan atau standar yang ada melainkan juga melibatkan pihak-pihak yang terkait langsung yaitu sumber daya manusia.

PT. Macansan Jaya Cemerlang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang percetakan mulai dari buku-buku pendidikan, buku instansi-instansi pemerintah, kalender, undangan, buku novel, buku rohani dan buku lain-lain. PT. Macanan Jaya Cemerlang resmi berdiri pada tanggal 1 Februari 1992. Sesuai dengan namanya, PT. Macanan Jaya Cemerlang berlokasi di Desa Macanan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Perusahaan memilih nama Macanan Jaya Cemerlang karena kata Macanan merupakan tempat perusahaan berdiri, yaitu di Padukuhan Macanan. Sedangkan kata Jaya dan Cemerlang merupakan harapan agar perusahaan tetap jaya dan cemerlang.

Sejak tahun 2003, PT. Macanan Jaya Cemerlang dipercaya menjadi mitra kerja beberapa Lembaga Pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk melaksanakan percetakan beberapa program salah satunya diberi kepercayaan mencetak soal Ujian Nasional untuk SMA/SMK pada tahun 2015. Di tahun 2004 dan 2009, PT. Macanan Jaya Cemerlang juga mendapatkan kepercayaan mengerjakan proyek dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) berupa percetakan surat-surat pemilihan umum.

Kinerja karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang yang maksimal sangatlah diharapkan oleh perusahaan. Semakin banyak karyawan yang mempunyai kinerja maksimal, maka produktivitas perusahaan secara keseluruhan akan meningkat sehingga perusahaan akan dapat mencapai visinya yaitu menjadi perusahaan multinasional yang professional dan mandiri. Karyawan dituntut untuk mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Keberhasilan karyawan dapat diukur melalui kepuasan konsumen, berkurangnya jumlah keluhan dan tercapainya target yang optimal. Kinerja karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang juga dapat diukur melalui penyelesaian tugasnya secara efektif dan efisien berupa tercapainya target cetak buku judul baru dan berkurangnya jumlah buku rusak dalam setiap periode cetak.

Menurunnya kinerja karyawan dapat dilihat dari berkurangnya kualitas buku (jilid rusak, kertas sobek, warna sampul buku luntur, dll) hal ini mengkibatkan ketidaktepatan dalam menyelesaikan tugas. Berikut adalah data jumlah buku rusak PT. Macanan Jaya Cemerlang dalam satu tahun terakhir.

Tabel 1. Data Jumlah Buku Rusak PT. Macanan Jaya cemerlang
Tahun 2015

No	Bulan	Tahun	Jumlah Terbit Judul Baru	Jumlah Eksemplar Buku	Jumlah Buku Rusak	Persentase
1	Januari	2015	271	42.320.288	1.285.000	3,03%
2	Februari	2015	301	416.799.657	15.568.250	3,73%
3	Maret	2015	290	43.000.804	1.890.022	4.39%
4	April	2015	123	21.535.486	895.245	4,16%
5	Mei	2015	503	108.595.160	5.256.780	4,84%
6	Juni	2015	587	178.128.962	9.125.303	5,12%
7	Juli	2015	557	134.198483	4.687.231	3,49%
8	Agustus	2015	572	161.626.388	7.230.920	4,48%
9	September	2015	231	35.764.062	1.200.110	3,35%
10	Oktober	2015	302	43.654.762	1.896.525	4,34%
	Rata-Rata					4,09%

Sumber: Bagian Administrasi PT. Macanan Jaya Cemerlang

Tabel di atas menunjukkan bahwa buku rusak masih terbilang banyak dengan rata-rata persentase buku rusak sejumlah 4,09%. Selama 10 bulan terakhir buku rusak paling banyak terjadi pada bulan Juni dengan persentase sejumlah 5,12%. Dari daftar tabel

di atas berdampak pada pekerjaan devisi lain yang juga ikut terhambat mengakibatkan tugas yang diberikan perusahaan tidak tepat waktu.

Sesuai dengan observasi yang telah penulis lakukan, disetiap pagi sesudah jam kerja dimulai di bagian kantor tidak langsung bekerja selama kurang lebih 30-60 menit mereka melakukan aktivitas diluar pekerjaanya seperti mengobrol, mainan *handphone* atau *browsing* internet. Mengakibatkan tertundanya pekerjaan sehingga pekerjaan yang harusnya selesai menjadi tertunda dan dikerjakan lain hari dan kurangnya kerjasama antar karyawan seperti di bagian pemasaran yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu pemasaran proyek pemerintah, pemasaran order luar dan pemasaran intan pariwara, apabila pekerjaan pemasaran proyek pemerintah belum selesai pekerjaannya bagian pemasaran lain tidak mau membantu walau pekerjaannya sudah selesai.

Menurunnya kinerja karyawan juga dapat terindikasi dari tingkat ketidakhadiran karyawan. Menurut Mudiartha, dkk (2001:93) menyatakan rata-rata absensi 2-3 persen per bulan masih bisa dinyatakan baik dan absensi lebih dari 3 persen menunjukkan semangat kerja yang buruk di dalam suatu perusahaan. Secara rinci indikasi menurunnya kinerja karyawan dalam hal ini tidak masuk kerja setiap bulannya, selama satu tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Data Presensi Karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang Tahun 2015

No	Bulan	Tahun	Total Karyawan	Total Hari Kerja (Hari)	Total Kehadiran Karyawan Seharusnya (orang)	Absensi Karyawan (orang)	Total Kehadiran (orang)	Persentase Ketidakhadiran Karyawan
1	Januari	2015	492	25	12.300	480	11.777	3,90 %
2	Februari	2015	495	23	11.385	479	10.906	4,21 %
3	Maret	2015	494	25	12.350	465	11.828	3,76 %
4	April	2015	491	25	12.275	399	11.761	3,25 %
5	Mei	2015	490	23	11.275	480	10.790	2,26 %
6	Juni	2015	491	25	12.275	463	11.747	3,77 %
7	Juli	2015	492	21	10.332	503	9.829	4,89 %
8	Agustus	2015	490	25	12.250	524	11.726	4,28 %
9	September	2015	490	25	12.250	416	11.731	3,39 %
10	Oktober	2015	494	26	12.884	568	12.246	4,39 %
							Rata-rata:	4,01 %

Sumber: Bagian Administrasi PT. Macanan Jaya Cemerlang

Berikut ini data hasil observasi awal yang dilakukan pada 40 orang karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja karyawan. Hasil observasi awal 40 responden mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan kerja karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Solusi Permasalahan Kinerja Karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang

No	Solusi Permasalahan	Jumlah Responden
1	Memperbaharui peraturan disiplin	20
2	Pelatihan kerja	8
3	Promosi kerja	10
4	Memperbaiki sikap pemimpin	12
5	Peningkatan jumlah kompensasi	14
6	Meningkatkan motivasi kerja	16

Sumber: Observasi dengan 40 orang karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang Klaten

Setiap responden dari 40 orang responden menjawab 2 jawaban mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan kerja karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang, dari hasil observasi awal tersebut terlihat bahwa banyak dari karyawan menyebutkan kompensasi sebagai faktor yang memengaruhi peraturan disiplin yakni sebanyak 20 jawaban. Kemudian diikuti faktor dari meningkatkan motivasi kerja sebanyak 16 jawaban, faktor peningkatan jumlah kompensasi sebanyak 14 jawaban responden, faktor memperbaiki sikap pemimpin sebanyak 12 jawaban responden, faktor promosi kerja sebanyak 10 jawaban responden, sedangkan 8 responden memilih faktor pelatihan kerja.

Dalam penelitian Haibuan (2004:213) berpendapat bahwa kedisiplinan adalah

kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku, sementara karyawan pada PT. Macanan Jaya Cemerlang masih belum mempunyai kesadaran dan kesediaan untuk menaati semua peraturan dan norma-norma sosial, seperti karyawan merasa keberatan dengan peraturan baru yang di terapkan perusahaan per bulan Oktober 2015 yang lebih ketat yaitu salah satu isi peraturan tersebut apabila karyawan terlambat 10 menit tidak boleh masuk kerja apapun alasannya mereka akan tetap mendapatkan sanksi, sementara kita tidak bisa memprediksi apa yang terjadi di perjalanan, karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang tidak hanya dari Klaten di luar kabupaten pun juga ada.

Bagi karyawan peraturan seperti itu sangat memberatkan terlebih karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang yang berasal dari luar kota untuk berangkat kerja sebagian besar menggunakan transportasi umum, dari hasil wawancara penulis dengan pihak perusahaan 50% ketidakhadiran karyawan yang tinggi tersebut karena kehadiran karyawan yang tidak tepat waktu. Selama penulis melakukan observasi karyawan pada bagian kantor kurang menaati tata tertib berpakaian dengan benar, seperti mengganti alas kaki, ketika datang dan pulang kantor memakai sepatu sedangkan pada saat di kantor ganti memakai sandal jepit.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara oleh pihak perusahaan adalah faktor gaji, karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang mulai dari tingat SD, SMP, SMA dan Sarjana gaji tidak dibedakan, pembeda gaji di perusahaan tersebut adalah jenjang karir, selain itu promosi kerja juga jarang dilakukan, dan pembagian pekerjaan di lakukan oleh perusahaan, sedangkan setiap individu mempunyai karakter berbeda-beda, tidak jarang karakter yang berbeda itu menimbulkan ketidakcocokan antar karyawan yang mengakibatkan kurang kompaknya dalam bekerja, menurunnya motivasi karyawan sangat mempengaruhi terhadap kinerjanya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak manajemen PT. Macanan Jaya Cemerlang pada pra survey diperoleh informasi bahwa manajer tingkat menengah sekelas supervisor dilihat kurang memiliki kedekatan kepada karyawan yang dipimpinnya dan juga kurang intens dalam memberikan motivasi kepada karyawan bawahannya, sehingga berdampak rendahnya semangat kerja karyawan, karena merasa kurang diperhatikan dan mengakibatkan kinerja karyawan menjadi tidak optimal dan kurang berkembang.

Berdasarkan uraian di atas, jelas terlihat bahwa disiplin kerja dan motivasi kerja berhubungan erat dengan kinerja karyawan dan belum menjadi hal yang terbukti benar positif di PT. Macanan Jaya Cemerlang ini. Pada penelitian yang sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan Yakub (2014) menunjukkan adanya hubungan positif antara disiplin kerja terhadap kinerja. Namun belum ada penelitian yang dilakukan di PT. Macanan Jaya Cemerlang sehingga penulis perlu mengangkat skripsi yang berjudul: "PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. MACANAN JAYA CEMERLANG".

Kajian Teori

Menurut Hasibuan (2001:34), kinerja adalah merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas kecakapan, usaha dan kesempatan. Berdasarkan paparan diatas kinerja adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu menurut standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun indikator kinerja menurut Setiawan dan Kartika (2004) yaitu Ketepatan penyelesaian tugas, Kesesuaian jam kerja, Tingkat kehadiran, dan Kerjasama antar karyawan.

Menurut Moenir (2004:113) disiplin kerja pada dasarnya selalu diharapkan menjadi ciri

setiap SDM dalam organisasi, karena dengan kedisiplinan organisasi akan berjalan dengan baik dan bisa mencapai tujuannya dengan baik pula. Setiap karyawan harus memiliki disiplin kerja didalam organisasi atau perusahaannya, seperti mematuhi peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang telah di tetapkan oleh perusahaan karena hal tersebut dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis sehingga akan memberikan dampak yang positif terhadap kinerja karyawannya. Adapun indikator disiplin kerja menurut Hasibuan (2005:110) yaitu Sikap, Norma, dan tanggung jawab.

Menurunnya kedisiplinan dari karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang terlihat dari data absensi masih banyaknya karyawan yang kurang disiplin. Dalam produksi masih banyak jumlah buku rusak di setiap bulannya, sehingga mengakibatkan mundurnya target waktu produksi. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya kinerja karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang yang dipengaruhi oleh faktor disiplin kerja.

Sebaliknya, ketika tingkat kedisiplinan karyawan tinggi, target dari perusahaan akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. tidak akan terjadi keterlambatan naskah yang harus dicetak sehingga hasil cetak buku akan stabil dalam setiap bulannya. Selain itu kualitas buku juga akan tetap terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja karyawan dapat ditingkatkan dengan disiplin kerja yang tinggi. Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja PT. Macanan Jaya Cemerlang diperlukan tingkat disiplin tinggi, sedangkan apabila disiplin karyawan rendah maka akan terjadi penurunan kinerja pada PT. Macanan Jaya Cemerlang tersebut.

H_1: Disiplin Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang

Menurut Hakim (2006:167) menyebutkan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yaitu faktor motivasi, dimana motivasi merupakan kondisi yang menggerakan seseorang berusaha untuk mencapai tujuan atau mencapai hasil yang diinginkan. Terbentuknya motivasi yang kuat, maka akan dapat membuahkan hasil atau kinerja yang baik sekaligus berkualitas dari pekerjaan yang dilaksanakannya. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan motivasi yang dimiliki oleh karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya akan memberikan peningkatan terhadap kinerjanya

Rendahnya motivasi karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang dapat terlihat dari manajer tingkat menengah sekelas supervisor kurang memiliki kedekatan kepada karyawan yang dipimp,minnya dan juga kurang intens dalam memberikan motivasi kepada karyawan bawahannya, sehingga berdampak rendahnya semangat kerja karyawan, karena merasa kurang diperhatikan dan mengakibatkan kinerja karyawan menjadi tidak optimal. Faktor gaji, pada perusahaan PT. Macanan Jaya Cemerlang karyawan dari mulai tingkat SD, SMP, SMA dan Sarjana gaji tidak dibedakan, pembeda gaji di perusahaan tersebut adalah jenjang karir, sehingga membuat karyawan merasa tidak nyaman dalam melakukan pekerjaannya. Hal ini justru menurunkan kinerja karyawan, menghambat proses produksi buku dan memperlambat pencapaian target perusahaan.

Sebaliknya, ketika tingkat motivasi karyawan tinggi, target dari perusahaan akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya, tidak akan terjadi keterlambatan naskah yang harus dicetak sehingga hasil cetak buku akan stabil dalam setiap bulannya. Selain itu kualitas buku juga akan tetap terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja karyawan dapat ditingkatkan dengan motivasi kerja yang tinggi. Motivasi karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang melakukan pekerjaan karena memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seorang karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang akan merasakan kekhawatiran apabila kebutuhan hidupnya tidak tercapai, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi dalam diri individu untuk lebih meningkatkan motivasinya.

H_2: Motivasi Kerja pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang Klaten

Disiplin kerja dan motivasi kerja diindikasikan memiliki pengaruh yang secara bersama-sama (simultan) terhadap kinerja dari karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang. Penelitian yang dilakukan Fitrah (2014:87) menyatakan bahwa disiplin kerja dan motivasi kerja memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap kinerja karyawan. Hal ini mengindikasikan bahwa disiplin kerja dan motivasi kerja, kedua variabel tersebut dapat berdampak atau menimbulkan pada peningkatan kinerja karyawan

Tingkat ketidak hadiran karyawan yang cukup tinggi dan kebijakan yang di berikan perusahaan seperti gaji, jenjang dan sikap pemimpin yang kurang tepat, hal ini juga menimbulkan kecemburuan sosial antar karyawan. Mengindikasikan bahwa disiplin kerja dan motivasi kerja, kedua variabel tersebut berdampak atau menimbulkan pengaruh terhadap menurunnya kinerja karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang.

Dengan disiplin kerja yang baik dan motivasi kerja yang optimal oleh pihak PT. Macanan Jaya Cemerlang, maka kinerja karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang akan lebih maksimal. Kinerja karyawan yang optimal dapat membawa PT. Macanan Jaya Cemerlang untuk dapat bersaing dengan percetakan lainnya dan menjadi percetakan yang lebih baik dan lebih maju di tahun-tahun selanjutnya.

Suatu perusahaan tidak hanya butuh disiplin kerja yang cukup baik, melainkan disiplin kerja yang baik atau bahkan sangat baik sehingga dapat menghasilkan suatu kinerja karyawan yang baik juga serta membantu perusahaan untuk dapat mencapai tujuan perusahaan dan dapat memajukan perusahaan. Motivasi kerja karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang yang baik akan mendorong karyawan untuk dapat bekerja lebih semangat dan lebih baik lagi sehingga hasil yang dicapai juga akan baik.

H_3: Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang Klaten.

METODELOGI

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen kuesioner atau angket. Data dianalisis menggunakan *Statistical Package of Social Sciences (SPSS)*, deskriptif analisis dan tes regresi berganda.

Penelitian ini dilakukan di PT. Macanan Jya Cemerlang Klaten. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2015 sampai Maret 2016. Penelitian ini menggunakan *proporsional sampling*. Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang Klaten yang berjumlah 120 orang.

Prosedur

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei dengan analisis data secara kuantitatif. Dalam penelitian survei, pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Instrumen kuesioner terlebih dahulu diuji validitasnya menggunakan *Confirmatory Factor Analysis,* dengan tingkat signifikansi KMO *and Bartlet's* disyaratkan harus lebih dari 0,5 dan uji reliabilitas menggunakan *Alpha Cronbach* disyaratkan harus lebih dari 0,60 (Arikunto, 2010: 193)

Data yang terkumpul kemudian dilakukan uji prasyarat analisis. Jenis uji prasyarat (uji asumsi klasik) yang digunakan adalah uji normalitas, uji linieritas dan uji multikolinieritas. Uji hipotesis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda.

Instrumen

Skala *likert* yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 skala *likert.* Jumlah pertanyaan dalam kuesioner adalah sebanyak 24 item pertanyaan yang terdiri dari 5 pertanyaan variabel kinerja karyawan yang diambil dari kuesioner yang dikembangkan oleh Setiawan dan Kartika (2014) dengan judul "Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada CV.

Berkat Nugraha." 8 pertanyaan variabel disiplin kerja diambil dari kuesioner yang dikembangkan oleh Sukarani (2013) denagn judul "Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Columbindo Perdana Cabang Purworejo". 11 pertanyaan variabel motivasi kerja diambil dari kuesioner Dwipaya (2013) denagn judul "Disiplin Kerja, Motivasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Percetakan Sadha Jaya di Denpasar". Dari hasil uji validitas diperoleh nilai KMO *and Bartlet's* sebesar 0,747.

Dari hasil uji validitas sebanyak 5 item pertanyaan dinyatakan gugur karena memiliki nilai *loading* factor dibawah 0,5. Hasil uji CFA terhadap instrument penelitian yang dinyatakan lolos (valid) adalah sebagai berikut.

Dari hasil uji reliabilitas diperoleh nilai *Alpha Cronbach* variabel kinerja karyawan sebesar 0,913, nilai *Alpha Cronbach* variabel disiplin kerja sebesar 0,881, dan nilai *Alpha Cronbach* motivasi kerja sebesar 0,814.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. **Deskriptif Karakteristik Responden**
   Deskripsi karakteristik responden berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa mayoritas berjenis kelamin laki-laki (48,3%), berusia antara 20-29 tahun (37,5%), berpendidikan SMA (90,0%), dan telah bekerja 1-10 tahun (81,7%).
2. **Deskriptif Data Penelitan**
   Hasil analisis data penelitian diketahui bahwa mayoritas karyawan memberikan penilaian terhadap kinerja karyawan masuk dalam kategori sedang yaitu sebanyak 79 orang (65,8%), mayoritas karyawan memberikan penilaian terhadap disiplin kerja masuk dalam kategori sedang yaitu sebanyak 79 orang (65,8%) dan mayoritas karyawan yang menilai bahwa beban kerja di bank masuk dalam kategori sedang sebanyak 76 orang (63,3%).

Tabel 4. Rangkuman Hasil Analisis Regresi Motivasi dan Beban kerja terhadap Kinerja karyawan

Independen dan Kontrol Variabel	Kinerja Karyawan			
	Model 1 (β)	Model 2 (β)	Model 3 (β)	Model 4 (β)
Jenis Kelamin	0,310**	0,274**	0,261**	0,236**
Umur	0,311**	0,274**	0,240**	0,216**
Pendidikan	0,218**	0,150**	0,261**	0,204**
Pengalaman dan Lama Kerja	0,284**	0,267**	0,202**	0,194**
Disiplin Kerja	-	0,213**	-	0,169**
Motivasi Kerja	-	-	0,302**	0,279**
R^2	0,600**	0,633**	0,676**	0,695**
ΔR^2	0,600**	0,032**	0,075**	0,095**

Sumber: Data Primer yang diolah 2016
**p<0.01; *p<0.05.

Pembahasan

1. **Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja karyawan PT. macanan Jaya Cemerlang Klaten**

   Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan PT. Macanna Jaya Cemerlang. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan regresi diperoleh nilai sebesar (β) 0,213 (**p<0.05; p=0,002). Kontribusi pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang sebesar (ΔR^2) 0,032.

   Disiplin Kerja karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang dapat dipengaruhi oleh semangat kerja karyawan, tingkat kompensasi yang diberikan, serta kepuasan kerja karyawan. Karyawan dengan semangat kerja yang tinggi cenderung akan bekerja dengan lebih baik, tepat waktu, dan tidak pernah membolos. Dengan dilandasi dengan aspek aspek di atas maka kedisplinan kerja akan berpengaruh besar pada kinerja perusahaan. Ketika tingkat disiplin kerja suatu perusahaan itu tinggi maka diharapkan karyawan akan bekerja lebih baik, sehingga produktivitas perusahaan meningkat. Selain itu disiplin kerja yang baik akan meningkatkan efisiensi kerja

semaksimal mungkin, tidak menghabiskan waktu yang banyak bagi perusahaan untuk sekedar melakukan pembenahan di aspek kedisplinan tersebut dan waktu dapat digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Pernyataan ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Sukarani (2013) didalam penelitiannya dengan judul "Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Columbindo Perdana Cabang Purworejo"

2. Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang Klaten

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang. Hal ini dibuktikan dengan hasil statistik uji regresi diperoleh nilai sebesar (β) 0,302 (**p<0.05; p=0,000). Kontribusi pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan sebesar (ΔR^2) 0,75

PT. Macanan Jaya Cemerlang Klaten perlu meningkatkan Motivasi kerja, agar seseorang dapat bekerja lebih optimal dan baik diperlukan adanya motivasi kerja yang baik dalam bekerja. Motivasi kerja karyawan yang baik menyebabkan karyawan akan bekerja dengan lebih semangat dan maksimal.

Pendapat ini diperkuat Siagian (2003:138) Motivasi mengajarkan bagaimana caranya mendorong semangat kerja bawahan agar mereka mau bekerja lebih giat dan bekerja keras dengan menggunakan semua kemampuan dan ketrampilan yang dimilikinya untuk dapat memajukan dan mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan motivasi tersebut adalah daya pendorong yang mengakibatkan seorang anggota organisasi mau dan rela waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam angka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang ditentukan sebelumnya.

3. Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja karyawan PT. amcanan Jaya Cemerlang Klaten

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja dan motivasi kerja berpengaruh positif dan simultan terhadap kinerja karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang. Hal ini dibuktikan dengan hasil statistik uji regresi diperoleh nilai disiplin kerja (β) 0,169 (**p<0.05; p=0,008) dan motivasi kerja (β) 0,695 (*p<0.05; p=0,000) berpengaruh positif dan simultan terhadap kinerja karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang. Kontribusi pengaruh variabel disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan sebesar (ΔR^2) 0,095,

Kinerja karyawan sangat dipengaruhi disiplin kerja dan motivasi kerja di dalam PT. Macanan Jaya Cemerlang. Dengan disiplin kerja yang baik dan motivasi kerja yang optimal oleh pihak perusahaan maka kinerja karyawan perusahaan akan lebih maksimal. Kinerja karyawan yang optimal akan dapat membawa PT. Macanan Jaya Cemerlang untuk dapat bersaing dengan perusahaan lainnya dan menjadi perusahaan yang lebih baik dan lebih maju di tahun tahun selanjutnya. Hal ini didukung oleh hasil penelitian penelitian Fitrah (2014) menyatakan bahwa disiplin kerja dan motivasi kerja memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap kinerja karyawan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

a. Disiplin Kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan regresi diperoleh nilai sebesar (β) 0,213 (**p<0.05; p=0,002). Kontribusi pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang sebesar (ΔR^2) 0,032.
b. Motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang. Hal ini dibuktikan dengan hasil statistik uji regresi diperoleh nilai sebesar (β) 0,302 (**p<0.05; p=0,000). Kontribusi pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan sebesar (ΔR^2) 0,032.
c. Disiplin kerja dan motivasi kerja berpengaruh positif dan simultan terhadap kinerja karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang. Hal ini dibuktikan dengan hasil statistik uji regresi diperoleh nilai disiplin kerja (β) 0,169 (**p<0.05; p=0,008) dan motivasi kerja (β) 0,279 (*p<0.05; p=0,000) berpengaruh positif dan simultan terhadap kinerja karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang. Kontribusi pengaruh variabel disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan sebesar (ΔR^2) 0,095.

Keterbatasan Penelitian

1. Sampel dalam penelitian ini hanya terbatas pada karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang saja, akan lebih baik jika sampel yang diambil meliputi seluruh karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang dan pimpinannya, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan dalam lingkup yang lebih luas.
2. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, sehingga sangat mungkin datanya bersifat subyektif, akan lebih baik bila ditambahkan metode wawancara sehingga hasil penelitian yang diperoleh lebih lengkap.
3. Penelitian ini hanya meneliti pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang. Masih ada faktor lain yang dapat memengaruhi kinerja karyawan misalnya budaya kerja, strategi organisasi, sistem manajemen, kepuasan kerja, gaya kepempimpinan, dan lingkungan kerja.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi pihak PT. Macanan Jaya Cemerlang

   Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada karyawan. Saran untuk perusahaan antara lain:

   a. Mengacu pada tingkat disiplin kerja yang masuk dalam kategori sedang, sebaiknya perusahaan memberlakukan masa transisi peraturan kepada karyawannya agar karyawan tidak merasa terbebani dengan peraturan yang baru.
   b. Mengacu pada tingkat motivasi kerja yang masuk dalam kategori sedang, sebaiknya bagi pimpinan PT. Macanan Jaya Cemerlang disarankan untuk meningkatkan motivasi dari pemimpin kepada karyawan dengan memberikan kesempatan untuk melakukan kreativitas dalam bekerja dan memberikan kesempatan untuk

mengembangkan ketrampilan dan kemampuan dalam bekerja.

c. Mengacu pada tingkat kinerja karyawan yang masuk dalam kategori sedang, sebaiknya perusahaan membuat sebuah peraturan yang tegas, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara pemberian *reward* kepada karyawan yang rajin dan karyawan yang sering telat di berikan *punishment* misal setiap terlambat 5 menit di potong gaji sesuai peraturan yang di tentukan.

2. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan metode lain dalam meneliti disiplin kerja dan motivasi kerja dengan kinerja karyawan, misalnya melalui wawancara mendalam terhadap responden, sehingga informasi yang diperoleh dapat lebih bervariasi daripada angket yang jawabannya telah tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

Fitrah, Moch Rizki. (2014). Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Hotel Bintang Mulia & Resto Jember. *Skripsi Tidak Diterbitkan*. Jember: Universitas Jember.

Hakim, Abdul. 2006. Analisis Pengaruh Motivasi, Komitmen Organisasi Dan Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah. *JRBI. Vol 2. No 2. Hal: 165-180.*

Hasibuan, Malayu P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Moenir, H.A.S. 2004. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara, Jakarta.

Mudiartha Utama, Wayan. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Denpasar: UPT Penerbit Universitas Udayana.

Setiawan, Ferry dan Dewi, Kartika. (2014). Pengaruh Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada CV. Berkat Anugrah. *Jurnal* Bali: Universitas Udayana.

Siagian, Sondang P. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sukarani. (2013). Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Columbindo Perdana Cabang Purworejo. *Oikonomia Vol. 2 No. 1.*

Lampiran Kuesioner Instrumen Penelitian

No	Kinerja
1.	Saya menyelesaikan tugas yang diberikan dengan tepat waktu.
2.	Saya bekerja sesuai dengan jam kerja yang ditetapkan.
3.	Saya jarang absen jika tidak benar-benar dalam keadaan mendesak.
4.	Saya bekerja sama dengan rekan kerja saya.
5.	Saya senang membantu rekan kerja yang kesulitan dalam bekerja.

No	Disiplin Kerja
6.	Saya selalu hadir tepat waktu pada jam kerja.
7.	Saya selalu merapikan kembali peralatan kerja setelah selesai dipakai
8.	Saya mampu menggunakan peralatan kerja dengan baik.
9.	Saya selalu menaati peraturan yang diterapkan perusahaan.
10.	Saya selalu menggunakan seragam kerja yang telah ditentukan.
11	Saya selalu menggunakan tanda pengenal di dalam perusahaan.
12.	Saya selalu mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
13.	Saya melakukan tugas–tugas kerja samsai selesai setiap harinya.

No	Motivasi Kerja
14.	Gaji saya cukup untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal saya.
15.	Gaji saya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan, minum saya.
16.	Saya bekerja mendapat jaminan asuransi keselamatan.
17.	Saya bekerja mendapat jaminan hari tua dari perusahaan.
18.	Saya merasa tidak dibeda-bedakan dengan rekan kerja dalam bekerja.
19.	Saya mempunyai kelompok kerja yang kompak.
20.	Perusahaan memberi gaji sesuai dengan jenjang pendidikan.
21.	Saya mendapat pujian dari pimpinan atas hasil kerja yang memuaskan.
22.	Perusahaan memberi kesempatan promosi jabatan atau kenaikan pangkat kepada saya jika memenuhi persyaratan.
23.	Pimpinan memberi kesempatan kepada saya untuk melakukan kreativitas dalam bekerja.
24.	Pimpinan memberi kesempatan kepada saya untuk mengembangkan ketrampilan dan kemampuan dalam bekerja.

ANALISIS PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI

Amin Wahyudi
Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Jarot Suryono
Kantor Informasi Komunikasi & Kehumasan Kabupaten Boyolali

ABSTRACT

Target of this research is to know leadership style, environment work and motivation that influence and significantly to officer performance in Office Information Communications and Public relations Sub-Province Boyolali by partial and together and also to know among leadership style, environment and motivation, what most dominant variable have an effect to performance. In data collecting conducted by and observation divide of questioner to be filled to responder counted 51 officers.

From the regression known that variables of leadership style, motivation and environment work have a positive and significant effect to officer performance by partial and also together and among leadership style, motivation and environment work, that most dominant have an effect to performance is environmental work variable. Independent variable (leadership style, motivation and environment work) contribution can explain its influence to dependent variable (performance) equal to 78,8%, while the rest 21,2% influenced by other variables which not checked (outside research variables). Result of assumption classical test known that there is no deviation to classic assumption.

Keywords*: leadership style, motivation, environmental work, performance.*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan faktor yang menentukan berhasil dan tidaknya suatu organisasi untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Agar sumber daya manusia dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi, maka organisasi harus mendayagunakan sumber daya manusia itu secara lebih efektif dan efisien dengan cenderung ke arah peningkatan kinerja karyawan.

Untuk mengoptimalkan sumber daya dalam organisasi perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan antara lain:

1. Gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam organisasi tersebut. Apapun bentuk kepemimpinannya akan mempengaruhi cara orang bekerja sebagai individu atau sebagai kelompok. Dalam kenyataannya pemimpin dapat mempengaruhi semangat dan kegairahan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi.
2. Motivasi kerja. Pemberian motivasi dengan melihat kebutuhan yang dominan dari para karyawan, baik kebutuhan fisiologis ataupun kebutuhan-kebutuhan lain, seperti kebutuhan keselamatan dan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, serta kebutuhan aktualisasi diri. Menurut Toha (1990: 202) mengarahkan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi yaitu dengan memotivasi pegawai secara individulah yang paling baik, karena masing-masing individu dalam melaksanakan aktivitas mempunyai tujuan sendiri-sendiri, sehingga untuk menyatukan tujuan tersebut pimpinan hendaknya memperhatikan dengan memotivasi agar aktivitas pegawai tidak menyimpang jauh dengan tujuan organisasi.
3. Lingkungan kerja organisasi, suasana yang ada dalam perusahaan tersebut. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas yang dibebankan (Nitisemito, 1990: 184). Lingkungan kerja adalah faktor-faktor di luar manusia baik fisik maupun nonfisik dalam suatu organisasi. Antara lingkungan kerja dengan kepuasan kerja terdapat hubungan yang positif, dan lingkungan kerja mempengaruhi produktivitas kerja suatu organisasi. Pembentukan lingkungan kerja yang terkait dengan kemampuan manusia dan produktivitas kerja dipengaruhi oleh faktor fisik, kimia, biologis, fisiologis, mental, dan sosial ekonomi. (Sumamur, 1986: 49).

Dalam pelaksanaan desentralisasi di bidang Informasi Komunikasi dan Kehumasan, maka Pegawai Negeri Sipil di Kantor Informasi Komunikasi dan Kehumasan Kabupaten Boyolali dituntut untuk dapat mempersiapkan diri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang profesional dan handal untuk menghadapi tantangan globalisasi. Tercapainya tujuan Kantor Informasi Komunikasi dan Kehumasan Kabupaten Boyolali tidak dapat terlepas dari sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Sebagai pelaku kegiatan dalam organisasi, sumber daya manusia (pegawai) yang ada harus dapat didayagunakan secara efektif dan efisien ke arah peningkatan kinerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai Kantor Informasi Komunikasi dan Kehumasan Kabupaten Boyolali antara lain meliputi: gaya kepemimpinan, motivasi dan lingkungan kerja.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Gaya Kepemimpinan

Gaya Kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang

lain. Atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku yang konsisten ditunjukkan dan sebagai yang diketahui oleh pihak lain ketika seseorang berusaha mempengaruhi kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut Fiedler dalam Toha (2001: 36) kinerja dapat dicapai secara efektif apabila pemimpin dalam organisasi tersebut mengembangkan suatu gaya kepemimpinan kontingensi. Pendekatan kontingensi merupakan pendekatan yang menyatakan bahwa teknik manajemen yang paling baik memberikan kontribusi untuk pencapaian sasaran organisasi mungkin bervariasi dalam situasi atau lingkungan yang berbeda. Pendekatan ini juga disebut pendekatan kontingensi/situasional. Filder berasumsi dalam teori tersebut bahwa cukup sulit bagi seorang pemimpin untuk mengubah gaya kepemimpinan sehingga membuat mereka sukses.

2. Motivasi

Menurut Hasibuan (2000: 142) motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Jadi motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensi bawahannya, agar mau bekerja sama secara produktif berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Motivasi menurut Chung dalam Gomes (1995: 177) dirumuskan sebagai perilaku yang ditujukan pada sasaran. Motivasi berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam mengejar suatu tujuan. Motivasi berkaitan erat dengan kepuasan pekerja dan performasi pekerjaan.

Handoko (1999: 25) mendefinisikan motivasi sebagai keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan dan memelihara perilaku manusia.

Untuk memotivasi karyawan, manajer harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan pegawai, karena orang mau bekerja adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan yang disadari (*conscious needs*) maupun kebutuhan yang tidak disadari (*unconscious needs*), berbentuk materi atau non materi, kebutuhan fisik maupun rohani (Hasibuan, 2000: 141).

Teori Douglas Mc Gregor dalam Manullang (2000: 171) menjelaskan bahwa ada dua pendekatan atau filsafat manajemen yang mungkin diterapkan dalam perusahaan. Masing-masing pendekatan itu mendasarkan diri pada serangkaian asumsi mengenai sifat manusia yang dinamainya teori X dan teori Y.

Asumsi teori X mengenai manusia adalah sebagai berikut:

- Pada umumnya manusia tidak senang bekerja.

- Pada umumnya manusia tidak senang berambisi, tidak ingin tanggung jawab dan lebih suka diarahkan.
- Pada umumnya manusia harus diawasi dengan ketat dan sering harus dipaksa untuk memperoleh tujuan organisasi.
- Motivasi hanya berlaku sampai tingkat *Lower Order Needs*.

Sedangkan asumsi teori Y mengenai manusia adalah :

- Bekerja adalah kodrat manusia, jika kondisi menyenangkan.
- Pengawasan diri sendiri tidak terpisahkan untuk mencapai tujuan organisasi.
- Manusia dapat mengawasi diri sendiri dan memberi prestasi pada pekerjaan yang diberi motivasi dengan baik (pada pekerjaan yang dimotiver dengan baik).
- Motivasi tidak saja mengenai *lower needs*, tetapi pula sampai *higher - order - needs*.

Mc Gregor berasumsi bahwa manusia, pada dasarnya tidak senang bekerja dan tidak bertanggung jawab dan harus dipaksa bekerja. Teori Y rancangan modern adalah didasarkan kepada asumsi bahwa "manusia pada dasarnya suka bekerja sama, tekun bekerja dan bertanggung jawab". Teori X dan teori Y melukiskan dua filsafat dasar mengenai sifat manusia.

Tingkah laku atau tindakan masing-masing individu pada suatu saat tertentu, biasanya ditentukan oleh kebutuhannya yang mendesak. Oleh karena itu setiap manajer yang ingin memotivasi bawahannya perlu memahami hirarki kebutuhan-kebutuhan manusia (Maslow dalam Manullang, 2000: 173).

Maslow mengembangkan teori motivasi berdasar hirarki kebutuhan manusia yang disusun dalam lima kategori menurut prioritas sebagai berikut :

- *Physiological Needs* - Kebutuhan badaniah, meliputi sandang, pangan dan pemuasan seksual.
- *Safety Needs* - Kebutuhan akan keamanan, meliputi baik kebutuhan akan keamanan jiwa maupun kebutuhan akan keamanan harta.
- *Social Needs* - Kebutuhan sosial, meliputi kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain, perasaan dihormati, perasaan maju atau berprestasi dan kebutuhan akan perasaan ikut serta (sense of participation).
- *Esteem Needs* - Kebutuhan akan penghargaan berupa kebutuhan akan harga diri dan pandangan baik dari orang lain terhadap kita.
- *Self Actualization Needs* - Kebutuhan akan kepuasan diri yaitu kebutuhan untuk mewujudkan diri "yaitu kebutuhan mengenai nilai dan kepuasan yang didapat dari pekerjaan".

3. Lingkungan Kerja

Untuk meningkatkan kinerja pegawai, suatu organisasi akan berusaha untuk membuat lingkungan kerja yang kondusif bagi pegawainya. Hal ini

seperti pendapat Mill dalam Timpe (1999: 3) lingkungan kerja yang menyenangkan mungkin dapat menjadi kunci pendorong bagi para karyawan untuk menghasilkan kinerja puncak.. Penciptaan lingkungan kerja yang baik dapat memberikan suatu daya tarik bagi pegawai untuk meningkatkan kinerja.

Pembentukan lingkungan kerja yang terkait dengan kemampuan manusia dan produktivitas kerja dipengaruhi oleh faktor fisik, kimia, biologis, fisiologis, mental, dan sosial ekonomi (Sumamur, 1986: 49).

Secara garis besar, lingkungan kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- Fasilitas kerja. Lingkungan kerja yang kurang mendukung pelaksanaan pekerjaan ikut menyebabkan kinerja yang buruk, seperti kurangnya alat kerja, ruang kerja pengap, ventilasi yang kurang, serta prosedur yang tidak jelas. (Tyssen, alih bahasa Hadyana, 1996:7).
- Gaji dan tunjangan. Gaji yang tidak sesuai dengan harapan pekerja akan membuat pekerja setiap saat melirik pada lingkungan kerja yang lebih menjamin pencapaian harapan pekerja.
- Hubungan kerja. Kelompok kerja dengan kekompakan dan loyalitas yang tinggi akan meningkatkan produktivitas kerja, karena antara satu pekerja dengan pekerja lainnya akan saling mendukung pencapaian tujuan dan atau hasil.

Secara genetis, setiap individu mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan pola perilaku tertentu untuk menanggulangi masalah lingkungan. Namun demikian, pembentukan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas kerja akan menimbulkan kepuasan kerja bagi pekerja dalam suatu organisasi (Kegan dalam Fraser, 1993: 83).

4. Kinerja

Menurut Robbins (1996: 110) Kinerja mempengaruhi langsung tingkat kinerja dan kepuasan seseorang karyawan lewat kesesuaian kemampuan pekerjaan. Kemampuan haruslah dipertimbangkan disamping motivasi, sedangkan tingkat-tingkat kinerja yang tinggi sebagian merupakan fungsi dari absennya rintangan-rintangan yang menjadi kendala karyawan itu (Robbins, 1996: 218). Menurut Timple (1999: 31) identitas yang akurat tentang penyebab–penyebab seseorang karyawan adalah sesuatu yang fundamental bagi pengawasan yang baik serta pembuatan keputusan yang lebih efektif dalam strategi–strategi perbaikan kinerja.

5. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Agusman S (2004) mengambil judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan Lingkungan Kerja Terhadap

Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Riau. Hasil penelitian tersebut adalah gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap kinerja. Korelasi antara gaya kepemimpinan, iklim organisasi dan motivasi terhadap kinerja mempunyai korelasi yang sangat kuat dan saling mempengaruhi.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sawitri Danik Rahayuni (2002) mengambil judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali. Hasil penelitian tersebut adalah gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan secara parsial maupun bersama-sama terhadap produktivitas kerja.Dapat diketahui bahwa gaya kepemimpinan sangat diperlukan sekali dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai.

6. Hipotesis

Di dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

a. Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai Kantor Informasi Komunikasi dan Kehumasan Kabupaten Boyolali.
b. Motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai Kantor Informasi Komunikasi dan Kehumasan Kabupaten Boyolali.
c. Lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai Kantor Informasi Komunikasi dan Kehumasan Kabupaten Boyolali.
d. Gaya kepemimpinan, motivasi dan lingkungan kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pegawai Kantor Informasi Komunikasi dan Kehumasan Kabupaten Boyolali.
e. Di antara gaya kepemimpinan, motivasi dan lingkungan, variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap kinerja pegawai Kantor Informasi Komunikasi dan Kehumasan Kabupaten Boyolali adalah variabel gaya kepemimpinan.

METODE PENELITIAN

1. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Informasi Komunikasi dan Kehumasan Kabupaten Boyolali. Dipilihnya lokasi tersebut berdasarkan pertimbangan ketersediaan data penelitian.

Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Informasi Komunikasi dan Kehumasan Kabupaten Boyolali yang berjumlah 51 orang.

Dalam penelitian ini prosedur penentuan sampel adalah dengan sistem sensus dimana semua populasi jadikan sampel. Jadi dalam penelitian ini jumlah sampel sama dengan jumlah populasi, yaitu sebanyak 51 orang pegawai.

2. Variabel dan pengukurannya

   Dalam penelitian ini variabel bebas/independen adalah gaya kepemimpinan (X_1), motivasi (X_2) dan lingkungan kerja (X_3). Sedangkan variabel terikat/dependen adalah Kinerja (Y).

   a. Gaya Kepemimpinan

      Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku yang konsisten ditunjukkan dan sebagai yang diketahui oleh pihak lain ketika seseorang berusaha mempengaruhi kegiatan-kegiatan orang lain. Variabel gaya kepemimpinan diukur dengan skala Likert. Skala penilaian menggunakan skala Likert 5 angka dengan skor terendah 1 (satu) dan tertinggi 5 (lima).

   b. Motivasi

      Motivasi kerja adalah suatu yang menimbulkan dorongan atau semangat kerja. Pemberian motivasi kepada karyawan dapat berupa kebutuhan fisiologis ataupun kebutuhan-kebutuhan lain, seperti kebutuhan keselamatan dan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, serta kebutuhan aktualisasi diri. Variabel motivasi diukur dengan skala Likert. Skala penilaian menggunakan skala Likert 5 angka dengan skor terendah 1 (satu) dan tertinggi 5 (lima).

   c. Lingkungan Kerja

      Lingkungan kerja terkait dengan kemampuan manusia adalah hal-hal yang berkaitan dengan fisik, kimia, biologis, fisiologis, mental, dan sosial ekonomi dalam pelaksanaan pekerjaannya. Variabel lingkungan kerja diukur dengan skala Likert. Skala penilaian menggunakan skala Likert 5 angka dengan skor terendah 1 (satu) dan tertinggi 5 (lima).

   d. Kinerja

      Kinerja merupakan hasil suatu pekerjaan dan kontribusi anggota pada organisasi yang dikaitkan dengan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengaturan, koordinasi, evaluasi dan pengawasan. Variabel kinerja diukur dengan skala Likert. Skala penilaian menggunakan skala Likert 5 angka dengan skor terendah 1 (satu) dan tertinggi 5 (lima).

3. Sumber Data

   Data yang dipelukan dalam studi ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuisioner yang telah dipersiapkan. Data primer yang dikumpulkan di antaranya adalah tanggapan responden tentang gaya kepemimpinan, motivasi, lingkungan kerja, dan kinerja pegawai.

   Data sekunder meliputi data penunjang dalam peneltian ini yang diperoleh dari arsip yang dimiliki oleh Kantor Informasi Komunikasi dan Kehumasan Kabupaten Boyolali.

4. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada responden, dengan menggunakan kuisioner yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor Informasi Komunikasi dan Kehumasan Kabupaten Boyolali sejumlah 51 orang, hasil dari penarikan sampel yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan alat bantu pengumpulan data berupa kuesioner. Adapun dalam kuesioner dibagi dalam 4 dimensi, yaitu: gaya kepemimpinan, motivasi, lingkungan kerja dan kinerja. Hasil pengumpulan data primer dari responden berupa jawaban dari kuesioner, selanjutnya dilakukan penentuan nilai atau skor dari alternatif jawaban dengan menggunakan skala Likert skala jenjang 5.

Sebelumnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data. Untuk menguji validitas ini digunakan *Pearson's correlation,* sedangkan uji reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha* dengan bantuan program komputer *SPSS for Windows versi 12.*

Pengumpulan data sekunder melalui bahan-bahan laporan instansi serta sumber-sumber yang telah dihimpun pihak lain.

5. Teknik Analisis Data

a. Analisis Regresi Liner Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Dengan model persamaan sebagai berikut:

$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \varepsilon$

Keterangan:

Y = Kinerja
a = Konstanta
b_n = Koefisien regresi variabel X_n
ε = *Error*
X_1 = Gaya kepemimpinan
X_2 = Motivasi
X_3 = Lingkungan Kerja

b. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja secara parsial. Nilai t dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{b - \beta}{sb}$$

Keterangan :

t = t hitung
β = Nilai 0
sb = *Standard error of regression coefficient*
b = Koefisien regresi

c. Uji F

Uji F dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas (gaya kepemimpinan, motivasi dan lingkungan kerja) secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (kinerja).

Menurut Supranto (2001: 100) F hitung dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{F hitung} = \frac{R^2 / k}{(1 - R)(n - k - 1)}$$

Keterangan:
R^2 = koefisien determinasi
k = jumlah variabel bebas
n = jumlah sampel

d. Uji determinasi

Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi menunjukkan persentase variasi nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.

Rumusnya adalah:
R^2 = (SSR) / (SST)
Keterangan :
R^2 = Koefisien determinasi
SSR = *Sum of Square Regression*
SST = *Sum of Square Total.*

Analisis data dilakukan dengan bantuan dari program SPSS 12.0 sebagai alat untuk meregresikan model yang telah dirumuskan. Pengujian hipotesis dapat dilakukan setelah model regresi bebas dari gejala asumsi klasik (multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan normalitas) agar hasil perhitungan dapat diinterpretasikan dengan ukurat dan bebas dari kelemahan-kelemahan yang terjadi karena adanya gejala-gejala tersebut

HASIL DAN ANALISIS

1. Uji Kualitas Instrumen

a. Uji Validitas

Semua item pertanyaan dari variabel gaya kepemimpinan, motivasi, lingkungan kerja dan kinerja, semua pertanyaan yang diajukan kepada

responden adalah valid, karena masing masing item memiliki koefisien korelasi lebih besar dari angka kritis (r tabel) 0,276.

b. Uji Reliabilitas

Menurut Nunnally dalam ghozali (2001: 140) suatu konstruk atau variabel dikatakan realibel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60. Berdasarkan pendapat tersebut maka kuesioner yang digunakan untuk variabel gaya kepemimpinan, motivasi, lingkungan kerja dan kinerja dapat dikatakan reliabel, karena semua variabel memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,60.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Ada tidaknya multikolinearitas dalam model dapat dilihat dari matrik kolerasi antar variabel bebas dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan alat Bantu *SPSS 12.00 For Windows*. Pada umumnya jika VIF (*Variance Inflation Factor*) lebih dari 5 maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas yang lain (Santoso, 2001: 356).

Dari hasil perhitungan variabel bebas (gaya kepemimpinan, motivasi dan lingkungan kerja) mempunyai VIF di bawah 5, yang berarti tidak ada multikolinearitas.

b. Uji Autokorelasi

Dari perhitungan nilai Durbin-Watson (D-W) sebesar 1,938, terletak di antara 1,72 – 2,28 yang berarti tidak ada autokorelasi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Jika model regresi layak untuk diprediksi (fit), maka data akan berpencar disekitar angka nol (0 pada sumbu Y) dan tidak membentuk suatu pola atau tren garis tertentu (Santoso, 2001).

Dari uji ini sebaran sebagian besar di sekitar titik nol (0 pada sumbu Y), serta tidak tampak suatu pola tertentu pada sebaran data tersebut. Maka dapat dikatakan model regresi memenuhi syarat untuk memprediksi kinerja.

d. Uji Normalitas

Dari uji ini diketahui bahwa nilai-nilai sebaran data terletak di sekitar garis lurus (tidak terpencar jauh dari garis lurus). Maka dapat dikatakan bahwa persyaratan Normalitas bisa dipenuhi.

3. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan analisis data berupa uji t dan uji F. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

a. Uji t.

Dari perhitungan uji t variabel gaya kepemimpinan (X_1) terhadap variabel kinerja (Y) diperoleh t_{hitung} (7,146) > t_{tabel} (2,012). Artinya secara parsial variabel gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai Kantor Informasi Komunikasi dan Kehumasan Kabupaten Boyolali terbukti kebenarannya.

Hasil perhitungan uji t variabel motivasi (X_2) terhadap variabel kinerja (Y) diperoleh t_{hitung} (2,055) > t_{tabel} (2,012). Artinya secara parsial variabel motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai Kantor Informasi Komunikasi dan Kehumasan Kabupaten Boyolali terbukti kebenaranya,

Hasil perhitungan uji t variabel lingkungan kerja (X_3) terhadap variabel kinerja (Y) diperoleh t_{hitung} (7,077) > t_{tabel} (2,012). Artinya secara parsial variabel lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa diduga gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai Kantor Informasi Komunikasi dan Kehumasan Kabupaten Boyolali terbukti kebenarannya.

Dari hasil perhitungan uji t diketahui bahwa nilai t_{hitung} variabel gaya kepemimpinan yang sebesar 7,146 adalah yang terbesar dibandingkan nilai t_{hitung} variabel motivasi maupun lingkungan kerja yang hanya sebesar 2,055 dan 7,077. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima yang menyatakan bahwa di antara gaya kepemimpinan, motivasi dan lingkungan, variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap kinerja pegawai Kantor Informasi Komunikasi dan Kehumasan Kabupaten Boyolali adalah variabel gaya kepemimpinan, terbukti kebenarannya.

b. Uji F

Dari perhitungan diperoleh nilai F_{hitung} (62,823) > F_{tabel} (2,80) artinya secara bersama-sama gaya kepemimpinan, motivasi dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan, motivasi dan lingkungan kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pegawai Kantor Informasi Komunikasi dan Kehumasan Kabupaten Boyolali terbukti kebenarannya.

c. Koefisien Determinasi (*Adjusted* R^2)

Dari analisis data menggunakan alat bantu program *SPSS 12.00 For Windows* diperoleh nilai *Adjusted* R^2 sebesar 0,788, berarti sumbangan variabel independen (gaya kepemimpinan, motivasi dan lingkungan kerja)

mampu menerangkan pengaruhnya terhadap variabel dependen kinerja pegawai Kantor Informasi Komunikasi dan Kehumasan Kabupaten Boyolali sebesar 78,8%, sedangkan sisanya 21,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti (variabel di luar penelitian).

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

a. Uji Validitas maupun uji Reliabilitas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan dari variabel gaya kepemimpinan (X_1), motivasi (X_2), lingkungan kerja (X_3) dan kinerja (Y) diterima atau semua pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah valid dan reliabel.
b. Berdasarkan hasil Uji t menunjukkan bahwa besarnya t_{hitung} variabel gaya kepemimpinan (7,146), motivasi (2,055) dan lingkungan kerja (7,077) yang seluruhnya lebih besar dari t_{tabel} (2,012). Sehingga hipotesis yang menyatakan gaya kepemimpinan, motivasi dan lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai Kantor Informasi Komunikasi dan Kehumasan Kabupaten Boyolali terbukti kebenarannya.
c. Berdasarkan hasil Uji F menunjukkan bahwa F_{hitung} (62,823) > F_{tabel} (2,80), sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan, motivasi dan lingkungan kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pegawai Kantor Informasi Komunikasi dan Kehumasan Kabupaten Boyolali terbukti kebenarannya.
d. Nilai t_{hitung} variabel gaya kepemimpinan adalah paling besar dibandingkan dengan variabel indepen lainnya. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa di antara gaya kepemimpinan, motivasi dan lingkungan, variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap kinerja pegawai Kantor Informasi Komunikasi dan Kehumasan Kabupaten Boyolali adalah variabel gaya kepemimpinan terbukti kebenarannya.
e. Berdasarkan hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan (X_1), motivasi (X_2) dan lingkungan kerja (X_3) memberikan sumbangan sebesar 78,8 % terhadap kinerja (Y) pegawai Kantor Informasi Komunikasi dan Kehumasan Kabupaten Boyolali.
f. Model regesi telah lolos uji asumsi klasik yang terdiri dari uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas dan uji normalitas.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan menyangkut jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu hanya meliputi tiga variabel bebas (gaya kepemimpinan, motivasi dan lingkungan kerja). Hal ini dapat dilihat dari hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,788, berarti sumbangan variabel independen (gaya kepemimpinan, motivasi dan lingkungan kerja) mampu

menerangkan pengaruhnya terhadap variabel dependen kinerja pegawai Kantor Informasi Komunikasi dan Kehumasan Kabupaten Boyolali sebesar 78,8%, sedangkan sisanya 21,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti (variabel di luar penelitian).

Saran

a. Perlunya dipertahankan, dipelihara dan ditingkatkan kondisi yang berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai Kantor Informasi Komunikasi dan Kehumasan Kabupaten Boyolali terutama mengenai gaya kepemimpinan, motivasi dan lingkungan kerja.
b. Perlu adanya penelitian di Kantor Informasi Komunikasi dan Kehumasan Kabupaten Boyolali yang mempengaruhi kinerja dengan menambah variabel selain variabel yang terdapat dalam penelitian ini, karena masih ada faktor-faktor lain di luar penelitian ini yang mempengaruhi kinerja sebesar 21,20%.

DAFTAR PUSTAKA

Agusman. 2004. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Riau*. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Arikunto, Suharsimi. 1999. *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta Jakarta.

Azwar, Saifuddin.1997. *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

Daniel C, Feldman dan Hugh J, Arnold. 1983. Managing Individual and Group Behaviour in Organizations. New York : Graw Hilal

Dessler, Gary. 1993. *Manajemen Personalia*. Jakarta. Penerbit Erlangga

Flippo, Edwin B. 1995. *Manajemen Personalia*. Penerjemah Moh. Masud, Erlangga Jakarta.

Fraser T.M. 1993. *Human Stress. Work and Job Satisfaction*, terjemahan Ny. L. Mulyana, Pustaka Binaman Presindo. Jakarta.

Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Gomes, Faustino Cardoso. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Andi Ofset. Yogyakarta.

Gujarati, Damodar. 1978. *Ekonometrika Dasar*. Erlangga Jakarta.

Handoko, T Hani. 1999. *Manajemen*. Edisi 2. BPFE Yogyakarta.

Hasibuan, Sayuti. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Edisi Revisi. Bumi Aksara Jakarta.

Kuncoro, Mudrajad. 2001, *Metode Kuantitatif*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Manullang, M. 2000. *Manajemen Personalia.*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Nitisemito, Alex S. 1990. *Manajemen Personalia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Radiq. 1998. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.. Badan Penerbit IPWI Jakarta.

Rahayuni, Sawitri Danik. 2002. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali*. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Robbins, Stephen. 1996. *Perilaku Organisasi Konsep: Kontrover Aplikasi*, Jilid 1 dan 2, PT. Prenhallindo, Jakarta

Santoso, Singgih. 2001. *Mengolah Data Statistik Secara Profesional*, PT Elex Media Computindo Kelompok Gramedia Jakarta.

Siagian, Sondang P. 1984. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.

Simamora, Henry. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. STIE YKPN Yogyakarta.

Singarimbun, Masri. 1981. *Metoda Penelitian Survey*. LP3ES Jakarta..

Sumamur. 1986. *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*. Gunung Agung Jakarta..

Supranto, 2001. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Erlangga Jakarta.

Suryabrata, Sumadi. 1992. *Metodologi Penelitian*. CV Rajawali Pers. Jakarta.

Timpe, A. Dale. 1999. *Kinerja Seri Manajemen Sumber Daya Manusia*, alih Bahasa Sofyan Cikmat. PT.Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Anggota IKAPI, Jakarta

Toha, Miftah. 2001. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. CV. Rajawali. Jakarta

Tyssen, Theodore. 1996. *Bisnis dan Manajemen Buku Petunjuk bagi Manajer Pemula*, Alih bahasa Hadyana. Jakarta.

JUDUL	VARIABEL	METODE
PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi pada PT. Macanan Jaya Cemerlang Klaten)	Pada jurnal ini menggunakan dua variabel bebas disiplin kerja dan motivasi kerja. Variabel terikat yaitu kinerja karyawan terhadap PT. tersebut	pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen kuesioner atau angket. Data dianalisis menggunakan Statistical Package of Social Sciences (SPSS). Uji hipotesis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda.
ANALISIS PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWA	Pada jurnal ini menggunakan tiga variabel bebas yaitu gaya kepemimpinan, motivasi dan lingkunggan. Sedangkan variabel terikat sama dengan jurnal diatas yaitu kinerja pegawai	Untuk menguji validitas ini digunakan Pearson's correlation, sedangkan uji reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha dengan bantuan program komputer SPSS for Windows versi 12 Uji hipotesis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda, uji t dan uji F.
	HIPOTESIS	
ANALISIS PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWA	Pada jurnal ini menggunakan lima hipotesis yaitu Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai Kantor Informasi Komunikasi dan Kehumasan Kabupaten Boyolali. b. Motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai Kantor Informasi Komunikasi dan Kehumasan Kabupaten Boyolali. c. Lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai Kantor Informasi	

	Komunikasi dan Kehumasan Kabupaten Boyolali. d. Gaya kepemimpinan, motivasi dan lingkungan kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pegawai Kantor Informasi Komunikasi dan Kehumasan Kabupaten Boyolali. e. Di antara gaya kepemimpinan, motivasi dan lingkungan, variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap kinerja pegawai Kantor Informasi Komunikasi dan Kehumasan Kabupaten Boyolali adalah variabel gaya kepemimpinan.	
PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi pada PT. Macanan Jaya Cemerlang Klaten)	Pada jurnal ini menggunakan tiga hipotesis yaitu H1: Disiplin Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang H2: Motivasi Kerja pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang Klaten H3: Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Macanan Jaya Cemerlang Klaten.	

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI

ABSTRAK

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk menambah aset tetap. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2013 dengan di moderasi variabel Pertumbuhan Ekonomi. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 Kabupaten/Kota. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD tahun 2011-2013. Pada penelitian ini, uji model untuk pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan *Moderated Regression Analysis*. Data yang telah dikumpulkan dianalisis terlebih dahulu dengan pengujian asumsi klasik. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal. Arah koefisien regresi bertanda positif, berarti bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum akan meningkatkan Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi hubungan dana alokasi umum dengan Belanja Modal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal

ABSTRACT

The local government allocated funds in the form of capital expenditure in the local budget to increase fixed assets. During this shopping areas more used to spending relatively less productive routine. The purpose of this study is to prove empirically the effect of regional revenue and general allocation funds for capital expenditures in the District / City Central Java Province Year 2011-2013 with moderation variables Economic Growth. The population in this study is the Regency / City Central Java province which consists of 35 District / City. This study uses secondary data such as Realization Report 2011-2013 budget. In this study, the test model for hypothesis testing will be done using Moderated Regression Analysis. The data has been collected and analyzed in advance with the classic assumption test. Based on the results of this study concluded that the original income has no effect on Capital Expenditure. General Allocation Fund has a positive influence on Capital Expenditure. Directions regression coefficient is positive, meaning that an increase in the General Allocation Fund will increase capital expenditures. Economic growth does not affect the Capital Expenditure. Economic growth does not moderate relationship with the Regional Income Capital Expenditure. Economic growth does not moderate the relationship with the general allocation fund capital expenditures.

Keywords: *Local Revenues, General Allocation Funds, Economic Growth and Capital Expenditure*

PENDAHULUAN

Sejak pemerintahan Indonesia dilanda krisis ekonomi pada awal tahun 1997 membuat perekonomian terpuruk dan mendorong pe merintah untuk melepas sebagian wewenang pe ngelolaan keuangan kepada daerah. Harapannya agar dapat membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat atas dasar kemampuan sendiri. Diberlakukannya otonomi daerah mem berikan kesempatan Pemerintah Daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah, kewenang an untuk mengelola sumber daya yang dimiliki

daerah secara efisien dan efektif, dan mening katkan kinerja keuangan daerah. Otonomi daerah menciptakan kemandirian untuk membangun daerah secara optimal dan tidak lagi terkonsen trasi di pusat sehingga meningkatkan kesejahtera an dan pelayanan publik,mengoptimalkan potensi pendapatan daerah serta memberikan porsi be lanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif di daerah.

Belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung (Permendagri No. 25 Tahun 2009), merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan otonomi daerah. Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap.Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan (Nuarisa, 2013).

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana yang di gunakan untuk masing-masing program kegiatan. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskrimi nasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kawedar dkk,. 2008).

Namun faktanya Pemerintah Daerah dalam pengalokasian pendapatan daerah cenderung menggunakan untuk keperluan belanja rutin dari pada belanja. modal.Kegiatan belanja (penge luaran) Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan ope rasi dalam pemerintahan. Untuk membiayai pe ngeluaran tersebut maka dibutuhkan sumber-sumber penerimaan. Sumber penerimaan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi umum.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam me ngoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai per wujudan asas desentralisasi. Pemerintah Daerah dalam mengaloksikan belanja modal harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya Pen dapatan Asli Daerah. Sehingga jika Pemerintah Daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkat kan Belanja Modal, maka Pemerintah Daerah harus berusaha keras untuk menggali Pendapatan Asli Daerah yang sebesar-besarnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Arwati & Hadiati (2013); Sugiarthi & Supadmi (2014) dan Jaya & Dwirandra (2014) menemukan bukti empiris bahwa Pendapatan Asli Daerah berpeng aruh positif terhadap Belanja Modal. Berbeda dengan Sugiarthi & Supadmi (2014) dan Jaya & Dwirandra (2014), penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) menunjukkan bahwa tidak ter dapatnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional di daerahnya masing–masing, hal tersebut me nimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Pemerin tah Pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing–masing daerah. Salah satu dana perim bangan yaitu Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan penge luaran Pemerintah Daerah dalam rangka pelak sanaan desentralisasi. Dengan dana tersebut Peme rintah Daerah menggunakannya untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada publik.

Penelitian yang dilakukan Tuasikal (2008); Wulandari, dkk (2013) dan Sugiarthi & Supadmi (2014) menemukan bukti empiris Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) memperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif ter hadap Belanja Modal. Sedangkan penelitian Arwati & Hadiati (2013) menemukan bukti empiris bahwa Dana Alokasi Umum tidak ber pengaruh terhadap belanja modal. Kondisi demi kian disebabkan Dana Alokasi Umum yang di terima oleh daerah hanya diperuntukan untuk membiayai pengeluaran rutin, seperti untuk be lanja pegawai dan hanya sedikit yang digunakan untuk belanja modal.

Pertumbuhan ekonomi merupakan para meter dari suatu kegiatan pembangunan, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat meng ukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian (Hasan, 2012). Pertumbuhan ekonomi didefinisi kan sebagai kondisi kegiatan dalam perekonomi an yang meyebabkan produksi barang dan jasa bertambah sehingga terjadinya peningkatan ke makmuran masyarakat. Salah satu tujuan peme rintah daerah adalah pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahunnya. Penelitian Wulandari, dkk (2013) menemukan bukti empiris bahwa Per tumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal (2008); Arwati & Hadiati (2013); Sugiarthi & Supadmi (2014) dan Jaya & Dwirandra (2014) menemukan bukti empiris bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel pemoderasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi diduga dapat memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Belanja Modal. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah seharusnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Daerah terhadap be lanja modal. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat.Selain itu,semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat, maka semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk membayar pungutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Hal ini akan meningkatkan sumber pe nerimaan daerah dan tentu saja akan membuat pe nerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum semakin tinggi. Peningkatan per tumbuhan ekonomi suatu daerah juga mampu me narik minat *investor* untuk berinvestasi di daerah sehingga sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terutama yang berasal dari pajak daerah akan se makin meningkat dan Dana Alokasi Umum yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pen dapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum yang tinggi selanjutnya akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang memadai sehingga hal ini akan me ningkatkan belanja modal. Penelitian oleh Taiwo dan Abayomi (2011) memperoleh hasil bahwa ter dapat hubungan yang positif antara Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal. Apabila pertumbuh an ekonomi meningkat dan disertai dengan pen dapatan daerah yang semakin tinggi, maka se mestinya mampu meningkatkan belanja modal suatu daerah.

Besarnya pertumbuhan ekonomi yang ter dapat pada masing-masing daerah dapat memper kuat maupun memperlemah hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Berdasarkan dari uraian di atas maka penelitian ini bermaksud untuk mengetahui seberapa besar Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpeng aruh pada alokasi belanja modal dengan per tumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi di Provinsi Jawa Tengah, sehingga penelitian ini tertarik mengambil judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi (Studi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2013)".

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori keagenan menyatakan bahwa hubu ngan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) di antara dua pihak, yaitu prinsipal dan

agen, dimana prinsipal memberi wewenang ke pada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal (Jensen dan Meckling 1976 dalam Yovita 2011). Terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, sehingga mungkin saja pihak agen tidak selalu melakukan tindakan ter baik bagi kepentingan prinsipal. (Bangun 2009 dalam Yovita 2011) menjelaskan bahwa teori ke agenan merupakan cabang dari *game theory* yang mempelajari suatu model kontraktual yang men dorong agen untuk bertindak bagi prinsipal saat kepentingan agen bisa saja bertentangan dengan kepentingan prinsipal.

Prinsipal pendelegasikan pertanggungjawa ban atas pengambilan keputusan kepada agen, di mana wewenang dan tanggung jawab agen mau pun prinsipal diatur dalam kontrak kerja atas per setujuan bersama.Kenyataannya,wewenang yang diberikan prinsipal kepada agen sering mendatang kan masalah karena tujuan prinsipal berbenturan dengan tujuan pribadi agen. Kewenangan yang dimiliki, manajemen bisa bertindak dengan hanya menguntungkan dirinya sendiri dan mengorban kan kepentingan prinsipal. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan informasi yang dimiliki oleh keduanya,sehingga menimbulkan adanya *asimetri informasi* (*asymmetric information*). Bangun (2009) dalam Yovita (2011) menyatakan bahwa informasi yang lebih banyak dimiliki oleh agen dapat memicu untuk melakukan tindakan-tinda kan sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk memaksimalkan *utility*-nya.Sedangkan bagi prinsipal akan sulit untuk mengontrol secara efek tif tindakan yang dilakukan oleh manajemen kare na hanya memiliki sedikit informasi yang ada.

Teori keagenan yang menjelaskan hubung an prinsipal dan agen berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori keagenan menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun *eksplisit,* dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal. (Lupia & McCubbins 2000 dalam Halim & Abdullah 2006) menyatakan: *delegation occurs when one person or group, a principal, select another person or group, an agent, to act on the principal's behalf* yang berarti delegasi terjadi ketika seseorang atau kelompok *(prinsipal*) me milih orang atau kelompok lain, (*agent*) bertindak atas nama (*prinsipal*).

Hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif ada lah prinsipal (Fozzard 2001 dalam Halim & Abdullah 2006). Seperti dikemukakan sebelum nya, diantara prinsipal dan agen senantiasa terjadi masalah keagenan. Oleh karena itu, persoalan yang timbul diantara eksekutif dan legislatif juga merupakan persoalan keagenan. Masalah ke agenan paling tidak melibatkan dua pihak, yakni prinsipal, yang memiliki otoritas untuk melaku kan tindakan-tindakan, dan agen, yang menerima pendelegasian otoritas dari prinsipal, dalam konteks pembuatan kebijakan oleh legislatif, *legislatur* adalah prinsipal yang mendelegasikan kewenangan kepada agen seperti pemerintah atau panitia di legislatif untuk membuat kebijakan baru. Hubungan keagenan disini terjadi setelah agen membuat usulan kebijakan dan berakhir setelah usulan tersebut diterima atau ditolak.

Anggaran Daerah

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai esti masi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu ang garan. Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam me ningkatkan pelayanan publik dan didalamnya ter cermin kebutuhan masyarakat dengan memper hatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (UU No 17/2003).

Penganggaran mempunyai tiga tahapan, yaitu (1) perumusan proposal anggaran, (2) pe ngesahan proposal anggaran, (3) pengimplemen tasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum (Samuels, 2000). Von Hagen (2002) dalam Darwanto (2007) menyatakan bahwa penganggaran dibagi ke dalam empat tahapan, yaitu *executive planning*, *legislative approval*, *executive implementation*, and *ex post*

accountability. Pada tahapan *executive planning* dan *legislative approval* terjadi interaksi antara eksekutif dengan legislatif dimana politik ang garan paling mendominasi, sementara pada tahap an *executive implementation* dan *ex post accoun tability* hanya melibatkan birokrasi sebagai *agent.*

Belanja Modal

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal di gunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk ang garan belanja modal dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa (*service quality management*), yakni upaya meminimasi kesenjangan (gap) antara tingkat layanan dengan harapan konsumen (Bastian, 2006). Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa
"Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".
Sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintah Daerah, yaitu :

1. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya di sebut Pendapatan Asli Daerah yaitu :

   a. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerin tah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanannya bisa dapat dipaksakan.

   b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mem punyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya ber sifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pu ngutan yang sifatnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

   c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pe ngelolaan kekayaan daerah yang dipisah kan. Hasil perusahaan milik daerah merupa kan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang di pisahkan,sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang ber sifat menambah pendapatan daerah, mem beri jasa, dan memperkembangkan pereko nomian daerah.

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ada lah pendapatan-pendapatan yang tidak ter masuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mem punyai sifat yang pembuka bagi pemerin tah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantap kan suatu kebijakan daerah di suatu bidang tertentu.

2. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, per kotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangu nan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan per undangan-undangan yang berlaku.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang ber asal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk mem biayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No.55/2005). Penelitian Harianto dan Adi (2007) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal, hasil pene litian ini serupa dengan penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa terd apat hubungan positif dan signifikan antara Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal. Bukti ter sebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diterima daerah maka akan semakin tinggi pula belanja modalnya. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah mampu meng optimalkan kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya meng andalkan Dana Alokasi Umum. Adanya dana transfer Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat maka daerah bisa fokus untuk menggu nakan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai belanja modal yang digunakan untuk meningkat kan pelayanan publik.Hal ini mengidentifikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenai kan *output* perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Boediono, 1985). Satu-satunya ukuran yang paling penting dalam konsep ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB) yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu negara atau nasional. Produk Domestik Regional Bruto untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasil kan pada suatu daerah atau lokal. Berdasarkan pengertian tersebut,peneliti menggunakan Produk Domestik Regional Bruto sebagai alat ukur untuk menilai pertumbuhan ekonomi.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembanguan sarana dan prasarana, antara lain sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, kompo sisi sektor industri,teknologi,pasar ekspor, situasi perekonomian internasional,kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan. Dalam pemerintah daerah, pemba ngunan sarana dan prasarana berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Darwanto, 2007). Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan dan perbaikan infrastruktur untuk pelayanan kepada publik dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Menurut Mardiasmo (2002:132) “Pendapa tan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil per usahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah".

Belanja Modal adalah pengeluaran angga ran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (Halim 2004). Dalam *Agency Theory*, hubungan kontraktual antara agen (masyarakat) dan prinsi pal (pemerintah) dalam konteks Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari kemampuan dan tang gung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang dibiayai dari belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya, sedangkan belanja modal itu sendiri sumber pembiayaannya dari Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah (*agen*) bertanggung jawab kepada masyarakat (prinsipal) karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada peme rintah daerah melalui pajak, retribusi, dan lain-lain. Dengan demikian, ada hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal. Tetapi tidak semua daerah yang berpendapatan tinggi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang baik pula.

Penelitian yang dilakukan oleh Arwati & Hadiati (2013); Sugiarthi & Supadmi (2014) dan Jaya & Dwirandra (2014) menemukan bukti empiris bahwa Pendapatan Asli Daerah berpeng aruh positif terhadap Belanja Modal. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya Pendapa tan Asli Daerah menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Hal ini sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, belanja modal harus disesuai kan dengan kebutuhan daerah dengan memper timbangkan Pendapatan Asli Daerah yang di terima, sehingga Pemerintah Daerah ingin me ningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah harus menggali Pendapatan Asli Daerah yang sebesar-besarnya.Sehingga dapat disimpul kan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, maka Belanja Modal juga akan semakin tinggi. Berdasarkan paparan di atas, hipotesisnya sebagai berikut:

H_1: Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Teori keagenan menurut Jensen dan Mec kling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewe nang pembuatan keputusan kepada agen. Perilaku *oportunistik* legislatif dapat terjadi pada dua posisi, yakni sebagai prinsipal dan juga sebagai agen. Sebagai prinsipal bagi eksekutif, legislatif dapat meralisasikan kepentingannya dengan mem buat kebijakan yang seolah-olah merupakan ke sepakatan diantara kedua belah pihak, tetapi menguntungkan legislatif dalam jangka panjang, baik secara individual maupun institusional. Melalui *discretionary power* yang dimilikinya, legislatif dapat mengusulkan kebijakan yang sulit untuk ditolak oleh eksekutif, meskipun usulan tersebut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik dan fungsi legislatif. Sebagai agen bagi pemilih, perilaku *oportunistik* legislatif lebih kelihatan jelas. Dalam penganggaran, legis latif semestinya membela kepentingan pemilih nya dengan mengakomodasi kebutuhan publik dalam anggaran. Usulan kegiatan yang akan di biayai dengan anggaran seharusnya didasarkan pada permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang terindetifikasi ketika legislatif turun ke lapa ngan melakukan penjaringan aspirasi masyarakat (Halim & Syukriy, 2006).

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut Dana Alokasi Umum adalah dana yang ber sumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Untuk mengurangi k etimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara Pusat dan Daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan

antara Pusat dan Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan Dana Alokasi Umum minimal sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri). Dengan per imbangan tersebut, khususnya dari Dana Alokasi Umum akan memberikan kepastian bagi Daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Penelitian yang dilakukan Tuasikal (2008); Wulandari, dkk (2013) dan Sugiarthi & Supadmi (2014) menemukan bukti empiris Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerima an Dana Alokasi Umum. Semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka alokasi Belanja Modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki Dana Alokasi Umum yang besar maka alokasi untuk anggaran Belanja Daerah (Belanja Modal) akan meningkat. Berdasarkan paparan di atas, hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

H_2: Dana Alokasi Umum Berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Agency Theory menjelaskan bahwa ada hubungan kontraktual di antara agen dan prinsi pal. Dimana agen bertanggung jawab kepada prinsipal. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, warga Indonesia yang berperan sebagai prinsipal merupakan objek pengukuran pertumbuhan eko nomi. Pemerintah sebagai agen yang bertanggung jawab kepada warga, bertugas untuk meningkat kan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dengan memberikan pelayanan yang baik melalui alokasi belanja modal.

Pertumbuhan ekonomi merupakan angka yang menujukkan kenaikan kegiatan perekonomi an suatu daerah setiap tahunnya. Tanggung jawab agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (ma syarakat) adalah memberikan pelayanan publik (*public service*) yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal. Karena per tumbuhan ekonomi yang baik harus didukung dengan infrastruktur atau sarana prasarana yang memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan sarana dan prasarana tersebut didapatkan dari pengalokasian anggaran belanja modal yang sudah dianggarkan setiap tahunnya dalam APBD. Dengan demikian, ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengalokasian belanja modal. Biasanya bila per tumbuhan ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus me ningkatkan alokasi belanja modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat tahun anggaran.

Penelitian yang dilakukan Wulandari, dkk (2013) membuktikan adanya pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka Belanja Modal akan semakin meningkat. Berdasarkan paparan di atas, hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

H_3: Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejah teraan masyarakat melalui peningkatan pelayan an, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemerintah memiliki peran yang penting dalam pembangunan daerah, dengan mengemukakan se jumlah faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah. Faktor-faktor tersebut adalah sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewira usahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pe laksanakan kebijakannya sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah ter sebut dalam menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang d iterima, maka semakin besar pula kewenangan

pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakan otonomi. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk kepentingan in vestasi yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin 2010 dalam Ardhini 2011).

Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi merupa kan salah satu tujuan dari suatu proses pem bangunan yang berjalan.Proses pembangunan eko nomi pada hakekatnya adalah upaya meningkat kan kapasitas perekonomian agar mampu men ciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi selu ruh rakyat (BPS, 2008: 1). Pertumbuhan Ekonomi yang baik harus didukung dengan insfrastruktur atau sarana dan prasarana yamg memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi. Biasanya jika Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus mening katkan Belanja Modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan pada tahun anggaran.

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel pemoderasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi diduga dapat memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap be lanja modal. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah seharusnya dapat mening katkan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pen dapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat. Penelitian yang dilakuan Sugiarthi & Supadmi(2014)menemukan bukti empiris Penda patan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi. Berdasarkan paparan di atas, hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

H_4: Pertumbuhan Ekonomi memoderasi Pen dapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Dana Alokasi Umum merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana Alokasi Umum merupa kan dana dana yang berasal dari Anggaran Pen dapatan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum adalah salah satu sumber untuk menambah investasi modal (Belanja Modal) yang membedakannya,

Pertumbuhan ekonomi adalah proses per ubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan Eko nomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaik an kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya Pertumbuhan Ekonomi merupa kan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi (www. id.wikipedia.org).

Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat mem perkuat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Semakin tinggi tingkat pertum buhan ekonomi suatu daerah seharusnya dapat meningkatkan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat berdampak pada pening katan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat. Selain itu, semakin tinggi dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan ke uangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang tinggi selanjutnya akan digun akan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang memadai sehingga hal ini akan meningkatkan Belanja Modal. Penelitian yang dilakuan Sugiarthi & Supadmi (2014) m enemukan bukti empiris Dana Alokasi Umum ber pengaruh positif terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai pemoderasi. Ber

dasarkan paparan di atas, hipotesis dapat di simpulkan sebagai berikut:

H_5: Pertumbuhan Ekonomi memoderasi Dana Alokasi Umum Berpengaruh Positif ter hadap Belanja Modal

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. merupakan data yang sudah diolah oleh BPS di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, secara berkala untuk me lihat perkembangan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Per tumbuhan Ekonomi selama periode tahun 2011-2013. Pada penelitian ini, uji model untuk peng ujian hipotesis akan dilakukan dengan mengguna kan *Moderated Regression Analysis* (MRA). MRA merupakan aplikasi khusus regresi ber ganda linear dimana dalam persamaan mengan dung unsur interaksi, yaitu perkalian dua atau lebih variabel independen (Ghozali, 2011:150).

$$BM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 PDRB + \beta_4 PAD*PDRB + \beta_5 DAU*PDRB + e$$

HASIL

Statistik Deskriptif

Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah, dapat dilihat bahwa data yang paling rendah sebesar Rp 53.122,17 juta yaitu Kota Pekalongan pada tahun 2011 (dapat dilihat dalam tabel 1), sedangkan data yang paling tinggi sebesar Rp 714.026,93 juta yaitu Kota Semarang pada tahun 2013. Pendapatan Asli Daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah dengan menggunakan jangka waktu periode tahun 2011-2013 memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 113.119,9232 juta dengan deviasi sebesar Rp 94.617,18458 juta.

Data Dana Alokasi Umum, dapat dilihat bahwa data yang paling rendah sebesar Rp 262.810,28 juta yaitu Kota Salatiga pada tahun 2011 (tabel 1), sedangkan data yang paling tinggi sebesar Rp 1.197.315,06 juta yaitu Kabupaten Cilacap pada tahun 2013. Dana Alokasi Umum kabupaten dan kota di Jawa Tengah dengan menggunakan jangka waktu periode tahun 2011-2013 memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 696.759,5669 juta dengan deviasi standar sebesar Rp 202.669,75281 juta.

Data Pertumbuhan Ekonomi yang diukur dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto, dapat dilihat bahwa data yang paling rendah sebesar Rp 961.024,62 juta yaitu Kota Salatiga pada tahun 2011 (tabel 1), sedangkan data yang paling tinggi sebesar Rp 25.697.338,39 juta yaitu Kota Semarang pada tahun 2013. Pendapatan Domestik Regional Bruto kabupaten dan kota di Jawa Tengah dengan menggunakan jangka waktu periode tahun 2011-2013 memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 5.121.235,6627 juta dengan deviasi standar sebesar Rp 4.776.185,58675 juta.

Berdasarkan data Belanja Modal, dapat di lihat bahwa data yang paling rendah sebesar Rp 66.479,0 juta yaitu Kota Magelang pada tahun 2011 (Tabel. 1), sedangkan data yang paling tinggi sebesar Rp 719.171,07 juta yaitu Kota Semarang pada tahun 2013. Belanja Modal kabu paten dan kota di Jawa Tengah dengan mengguna kan jangka waktu periode tahun 2011-2013 me miliki nilai rata-rata sebesar Rp 194.928,9518 juta dengan deviasi standar sebesar Rp 93.538,16625 juta.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian yang dapat dilihat pada tabel 2. diperoleh nilai signifikan variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,131 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa varia bel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini mem buktikan bahwa hipotesis yang menyatakan “Pen dapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal”, tidak terdukung.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian yang dapat dilihat pada tabel 2. diperoleh nilai signifikan variabel Dana Alokasi Umum sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal. Arah koefisien

regresi bertanda positif, berarti bahwa peningkat an Dana Alokasi Umum akan meningkatkan Belanja Modal. Hal ini membuktikan bahwa hipo tesis yang menyatakan "Dana Alokasi Umum ber pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal", terdukung.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian yang dapat di lihat pada tabel 2. diperoleh nilai signifikan varia bel Pertumbuhan Ekonomi dengan probabilitas sebesar 0,090 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak ber pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis yang menyata kan "Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal", ditolak

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pen dapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa se makin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka penge luaran pemerintah atas Belanja Modal belum tentu juga akan semakin tinggi.

Dalam *Agency Theory*, hubungan kontrak tual antara agen (masyarakat) dan prinsipal (pemerintah) dalam konteks Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari kemampuan dan tang gung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal, yaitu dengan menyediakan sarana dan pra sarana yang memadai yang dibiayai dari belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya, sedang kan belanja modal itu sendiri sumber pembiaya annya dari Pendapatan Asli Daerah.

Pada penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak signifikan dapat disebabkan karena adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak diikuti dengan peningkatan Belanja Modal. Berdasarkan hasil analisis terdapat beberapa daerah di Kabu paten / Kota di Propinsi Jawa tengah, dimana Pendapatan Asli Daerah meningkat dari tahun 2011-2013 akan tetapi tidak diikuti dengan peningkatan Belanja Modal, misalnya Kabupaten Demak. Kabupaten Demak lebih mengutamakan belanja pegawai. Menurut Yovita (2011) provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah yang besar cende rung tidak memiliki Belanja Modal yang besar. Hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain, seperti belanja rutin/belanja operasional. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) menunjuk kan bahwa tidak terdapatnya pengaruh Pendapat an Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendaptan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004).

Teori keagenan menurut Jensen dan Mec kling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (principal) menyewa orang lain (*agent*) untuk me lakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pem buatan keputusan kepada agen. Perilaku *opor tunistik* legislatif dapat terjadi pada dua posisi, yakni sebagai prinsipal dan juga sebagai agen. Sebagai prinsipal bagi eksekutif, legislatif dapat meralisasikan kepentingannya dengan membuat kebijakan yang seolah-olah merupakan kesepakat an diantara kedua belah pihak, tetapi menguntung kan legislatif dalam jangka panjang, baik secara individual maupun institusional. Melalui *discretio nary power* yang dimilikinya, legislatif dapat me ngusulkan kebijakan yang sulit untuk ditolak oleh eksekutif, meskipun usulan tersebut tidak ber hubungan langsung dengan pelayanan publik dan fungsi legislatif. Sebagai agen bagi pemilih, per laku *oportunistik* legislatif lebih kelihatan jelas. Dalam penganggaran, legislatif semestinya mem bela kepentingan pemilihnya dengan mengako modasi kebutuhan publik dalam anggaran. Usulan

kegiatan yang akan dibiayai dengan anggaran seharusnya didasarkan pada permasalahan dan ke butuhan masyarakat yang terindetifikasi ketika legislatif turun ke lapangan melakukan penjaring an aspirasi masyarakat (Halim & Syukriy, 2006).

Untuk mengurangi ketimpangan dalam ke butuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara Pusat dan Daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan Dana Alokasi Umum minimal sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari Dana Alokasi Umum akan mem berikan kepastian bagi Daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai ke butuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan Dana Alokasi Umum oleh suatu Daerah (Pro vinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan oleh kebutuhan Daerah (*fiscal needs*) dan potensi Daerah (*fiscal capacity*). Dengan pengertian lain, Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan Daerah melebihi dari potensi penerimaan Daerah yang ada.

Distribusi Dana Alokasi Umum kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh Dana Alokasi Umum yang relatif besar, sehingga beberapa daerah, khususnya daerah yang kaya sumber daya alam dapat memperoleh Dana Alokasi Umum yang negatif. Distribusi alokasi Dana Alokasi Umum per daerah dipengaruhi oleh data kebutuh an fiskal daerah, yang secara umum mengindikasi kan perkiraan besarnya kebutuhan anggaran yang diperlukan oleh daerah dalam memberikan pela yanan publik kepada masyarakat. Indikator dalam perhitungan kebutuhan fiskal, secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok besar,yaitu indika tor ke pendudukan dan indikator kewilayahan

Dana Alokasi Umum merupakan dana trans fer yang bersifat *block grant*. Alokasi pengguna annya diserahkan kepada daerah sesuai prioritas daerah yang idealnya dialokasikan untuk belanja yang berimplikasi meningkatkan efisiensi dan efe ktivitas pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Tuasikal (2008); Wulandari, dkk (2013) dan Sugiarthi & Supadmi (2014) menemukan bukti empiris Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Penelitian ini menunjukkan bahwa Per tumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Keadaan ini memberi indikasi bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki kontribusi positif terhadap Belanja Modal.

Terkait dengan *Agency Theory* adanya Konflik kepentingan akan muncul dan pen delegasian tugas yang diberikan kepada agen tetapi mempunyai kecenderungan untuk me mentingkan diri sendiri dengan mengorbankan ke pentingan pemilik, dimana agen bertanggung jawab kepada prinsipal. Dalam konteks pertum buhan ekonomi, warga Indonesia yang berperan sebagai prinsipal merupakan objek pengukuran Pertumbuhan Ekonomi. Pemerintah sebagai agen yang bertanggung jawab kepada warga, bertugas untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi daerah tersebut dengan memberikan pelayanan yang baik melalui alokasi Belanja Modal. Eksekutif akan memiliki kecenderungan meng usulkan anggaran belanja yang lebih besar dari yang aktual terjadi saat ini (asas maksimal).

Usulan anggaran yang mengandung *slack* seperti ini merupakan gambaran adanya *asimetri informasi* antara eksekutif dan legislatif. *Slack* ter sebut terjadi karena agen (eksekutif) mengingin kan posisi yang relatif aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adanya ke senjangan / *slack* mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan *output* perkapita yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto. Pertumbuhan Ekonomi bertujuan untuk peningkatan ekonomi yang berkelanjutan.Tidak signifikannya pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Belan ja Modal berarti bahwa dalam manajemen pe

ngeluaran pemerintah daerah yang terkait dengan alokasi Belanja Modal. Produk Domestik Regio nal Bruto tidak menjadi acuan utama dalam proses penyusunan APBD dan alokasi belanja modal, tetapi ada sejumlah faktor tertentu yang mempengaruhinya, misalnya proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran setiap kabupaten/ kota juga mengalami perbedaan.

Penelitian ini sejalan dengan yang di lakukan oleh Tuasikal (2008); Arwati & Hadiati (2013); Sugiarthi & Supadmi (2014) dan Jaya & Dwirandra (2014) menemukan bukti empiris per tumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifi kan terhadap Belanja Modal.

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Peng aruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat disebabkan karena pertumbuhan ekonomi di wilayah Propinsi Jawa Tengah tidak merata dan terjadi adanya kesen jangan masing-masing wilayah. Selain itu dapat disebabkan juga karena peningkatan Pendapatan Asli Daerah lebih banyak digunakan untuk mem biayai belanja pegawai dan biaya langsung lain nya daripada untuk membiayai Belanja Modal. Selain itu peningkatan Pertumbuhan Ekonomi masing-masing daerah tidak sama dan mengalami kesenjangan, sehingga Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

Penelitian ini berlawanan dengan Sugiarthi & Supadmi (2014) menemukan bukti empiris Pe rtumbuhan Ekonomi memoderasi Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Peng aruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pertum buhan Ekonomi tidak sebagai memoderasi peng aruh Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal. Hal ini dapat disebabkan karena adanya masalah keagenan yang ditimbul dikalangan eksekutif (pemerintah pusat) cenderung memaksimalkan *utility* (*self interest*)dalam pembuatan atau penyu sunan anggaran APBD, karena memiliki keunggu lan informasi (*asimetri informasi*).Akibatnya ekse kutif cenderung melakukan "*budgetary slack*". Hal ini terjadi disebabkan pihak eksekutif akan mengamankan posisinya dalam pemerintahan di mata legislatif masyarakat/rakyat, bahkan untuk kepentingan pilkada berikutnya, tetapi *budgetary slack* APBD lebih banyak untuk kepentingan pribadi kalangan eksekutif (*self interest*) dari pada untuk kepentingan masyarakat. Sehingga ter jadinya perilaku *opportunistik* yang dimanfaat kan oleh pihak agen/eksekutif yaitu sebagai pemerintah pusat dan prinsipal/legislatif sebagai pemerintah daerah dapat mempengaruhi kesenja ngan Pertumbuhan Ekonomi yang terjadi pada masing-masing wilayah. Adanya kesenjangan dapat mengakibatkan Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal.

Penelitian ini berlawanan dengan Sugiarthi & Supadmi (2014) menemukan bukti empiris Per tumbuhan Ekonomi memoderasi Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Peng aruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian yang dapat dilihat pada tabel 2. diperoleh nilai signifikan variabel interaksi antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi dengan *probabili tas* 0,268 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak me moderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah ter hadap Belanja Modal. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa "Per tumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Pen dapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal", tidak terdukung.

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Peng aruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian yang dapat di lihat pada tabel 1. diperoleh nilai signifikan varia

bel interaksi antara Dana Alokasi Uumum dengan Pertumbuhan Ekonomi dengan *probabilitas* 0,353 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa varia bel Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa "Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal", tidak terdukung.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
2. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal. Arah koefisien regresi bertanda positif, berarti bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum akan meningkatkan Belanja Modal.
3. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
4. Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal.
5. Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi hubungan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal.

Keterbatasan Penelitian

1 Data penelitian hanya dari 35 Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah, sehingga tidak mencerminkan kondisi Pemerintahan Daerah secara keseluruhan.

2 Data yang digunakan hanya data sekunder data publikasi DJPK, dengan data *time series* hanya 3 tahun, yaitu tahun 2011-2013.

3 Dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi) dalam mempengaruhi Belanja Modal.

Implikasi

1. Pemerintah Provinsi supaya lebih memper hatikan alokasi anggaran dari dana Penda patan Asli Daerah, diupayakan dialokasikan lebih banyak kepada Belanja Modal yang memberikan implikasi peningkatan kesejah teraan masyarakat.
2. Pemerintah pusat diharapkan dapat mening katkan porsi Dana Alokasi Umum kepada pemerintah provinsi sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
3. Pemerintah Daerah diharapkan lebih meng utamakan alokasi kepada belanja modal yang diprioritaskan pada peningkatan ke sejahteraan rakyat sehingga mampu men dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ardhini. (2011). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pe layanan Publik Dalam Prespektif Teori Ke agenan (studi pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah). ***Skripsi.*** Universitas Dipone goro, Semarang.

Arwati dan Hadiati. (2013). Pengaruh Pertumbuh an Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasi an Anggaran Belanja Modal pada Pemerin tah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. *Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan* 2013 (SEMANTIK 2013)

Bastian, Indra. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta:* Salemba Empat

Boediono, (1985). *Ekonomi Makro*. Yogyakarta : BPFE

Darwanto & Yustikasari, Yulia. (2007). Peng aruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makassar.

Ghozali, Imam. (2011). *Analisis Multivariate Program IBM SPSS 19*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul, (2004), *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.

Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. (2006). Hubungan dan masalah keagenan di Peme rintahan Daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64

Harianto, David dan Priyo Hari Adi, (2007). Hubungan Antara Dana Alokasi mum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makassar.

Hasan,T.I.B. (2012). Pengaruh Belanja Modal Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penduduk Miskin di Aceh. *Journal SAINS Riset*, 1(1).

Indriantoro, Nur, and Supomo, Bambang, (2001), *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: BPFE

Jaya dan Dwirandra. (2014). Pengaruh Pendapat an Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Univer sitas Udayana* 7.1 (2014):79-92

Kawedar, Warsito dkk, (2008). *Akuntansi Sektor Publik*, Semarang UNDIP.

Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Nuarisa, sheila Ardhian. (2013). Pengaruh PAD, DAU DAN DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. http://journal. unnes.ac.id/sju/index.php/aaj

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapat an dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

_____.(2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sugiarthi dan Supadmi. (2014). Pengaruh PAD, DAU, dan SILPA pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pe moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7.2 (2014): 477-495

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta

Taiwo,Muritala and Taiwo Abayomi. (2011). Goverment Expenditure and Economic Development.*European Journal of Business and Management,* 3(9).

Tuasikal, Askam. (2008).Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Indonesia.*Jurnal Telaah& Riset Akuntansi*, 1(2), h:142-155.

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

Von Hagen, Jurgen. (2002). Fiscal rules, fiscal institutions, and fiscal performance. *The Economic and Social review* 33(3): 263-284.

Wandira, Arbie Gugus. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Peng alokasian Belanja Modal. http://journal. unnes.ac.id/sju/index.php/aaj

Wulandari, dkk. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Pasa man Barat (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2005-2012). http://ejournal-s1.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/Ekonomi/article/view/1129

Yovita, Farah Marta.(2011).Pengaruh Pertumbuh an Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasi an Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010).***Skripsi*.** Fakultas Ekonomi Universitas Diponogoro

Lampiran

Tabel 1.
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	105	53122.17	714026.93	113119.9232	94617.18458
DAU	105	262810.28	1197315.06	696759.5669	202669.75281
PDRB	105	961024.62	25697338.39	5121235.6627	4776185.58675
BM	105	66479.09	719171.07	194928.9518	93538.16625
Valid N (listwise)	105				

Tabel 2. Hasil Uji Parsial
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	16946.029	27738.848		.611	.543
	PAD	.300	.197	.303	1.524	.131
	DAU	.211	.042	.457	4.966	.000
	PDRB	-.007	.004	-.343	-1.710	.090
	PAD_PDRB	.00000000999	.000	.267	1.114	.268
	DAU_PDRB	.00000000577	.000	.265	.933	.353

a. Dependent Variable: BM

KEMAMPUAN ALOKASI BELANJA MODAL MEMODERASI PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Abstrak: Kemampuan Alokasi Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti tentang kemampuan alokasi Belanja Modal memoderasi pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Penelitian ini mencakup 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali dalam rentang waktu amatan 2008-2013, menggunakan sampel jenuh, dengan data sekunder yang diperoleh dari Biro Keuangan Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik. Teknik analisis data meliputi: uji asumsi klasik, *Moderated Regression Analysis,* uji koefisien determinasi, uji F, dan uji t. Hasil penelitian ini adalah alokasi belanja modal menurunkan pengaruh kinerja keuangan daerah (rasio pajak) pada IPM. Alokasi belanja modal tidak memoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah (pajak per kapita) pada IPM, dan alokasi belanja modal meningkatkan pengaruh kinerja keuangan daerah (upaya pajak, ruang pajak) pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Kata kunci :rasio pajak, pajak per kapita, upaya pajak, ruang fiskal, Indeks Pembangunan Manusia

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia senantiasa berada di baris terdepan dalam perencanaan pembangunan. Jadi hakekat pembangunan adalah usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat, sehingga dalam penyusunan anggaran alokasi belanja untuk keperluan pembangunan manusia perlu diprioritaskan (Fhino, 2009). Prioritas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai alat ukurnya. Terkait dengan pembangunan, paradigma yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia, dapat dilihat melalui tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara. Sejak tahun 1990 perkembangan tingkat kualitas hidup manusia (indeks HDI) di seluruh dunia diteliti dan laporannya diterbitkan oleh *United Nations Development Program* (UNDP). Berdasarkan laporan tahunan UNDP pada tahun 2013 menginformasikan bahwa IPM Indonesia mengalami peningkatan. Kajian seksama masih perlu tetap dilakukan, mengingat IPM negara kita ternyata masih berada di bawah Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam (UNDP, 2014). Hal tersebut menunjukkan masih diperlukannya upaya keras untuk memperbaiki kualitas manusia Indonesia di tengah- tengah persaingan dengan masyarakat internasional. Upaya meningkatkan IPM Indonesia tidak dapat dilepaskan dari upaya simultan untuk meningkatkan IPM kabupaten/kota seluruh Provinsi di Indonesia, salah satunya adalah IPM di semua kabupaten/kota provinsi Bali. Perkembangan IPM Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2008 s.d 2013 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2008-2013

No	Kab/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jembrana	72.02	72.45	72.69	73.18	73.62	74.29
2	Tabanan	73.73	74.26	74.57	75.24	75.55	76.19
3	Badung	74.12	74.49	75.02	75.35	75.69	76.37
4	Gianyar	72.00	72.43`	72.73	73.43	74.49	75.02
5	Klungkung	69.66	70.19	70.54	71.02	71.76	72.25
6	Bangli	69.72	70.21	70.71	71.42	71.8	72.28
7	Karangasem	65.46	66.06	66.42	67.07	67.83	68.47
8	Buleleng	69.67	70.26	70.69	71.12	71.93	72.54
9	Denpasar	77.18	77.56	77.94	78.31	78.8	79.41
	Bali	71.51	71.52	72.28	72.90	73.49	74.11

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013 (data diolah)

Pada tabel 1 ditunjukkan bahwa IPM Provinsi Bali peningkatannya tidak konsisten. Pada tahun 2009 ke 2010 peningkatan IPM Provinsi Bali adalah sebesar 0,76, sedangkan pada tahun 2012 ke 2013 peningkatannya sebesar 0,62. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penerimaan yang dimiliki pemerintah Provinsi Bali belum optimal digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM. Peningkatan IPM, salah satunya ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah yaitu salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu komponen PAD Provinsi Bali adalah Pajak Daerah. Dari tahun 2012 s.d. 2014 Provinsi Bali mempunyai rasio pajak di atas rata-rata nasional. Bahkan pada tahun 2012 dan 2014 Provinsi Bali adalah sebagai Provinsi dengan rasio pajak dan rasio pajak per kapita tertinggi di Indonesia (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan/DJPK, 2014). Ini dapat dimaknai bahwa semakin meningkatnya rasio- rasio tersebut berarti pemerintah kabupaten/kota memiliki dana yang cukup untuk mendukung berbagai upaya peningkatan IPM, namun kenyataannya alokasi dana untuk belanja publik relatif rendah sehingga menyebabkan pelayanan publik tidak memadai bagi masyarakat

Semenjak diterapkannya desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengeksplorasi dan mengumpulkan PAD, sehingga dengan desentralisasi fiskal diharapkan mampu meningkatkan IPM. Bentuk indikasi dari keberhasilan penerapan desentralisasi fiskal adalah pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini telah banyak dilakukan, namun hasilnya tidak konsisten. Diantaranya penelitian Gembira (2011) menunjukkan bahwa secara simultan variabel

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil (pajak dan bukan pajak) pengaruhnya positif pada IPM, hanya variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap IPM secara parsial. Sedangkan variabel lain berupa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil (pajak dan bukan pajak) pengaruhnya tidak signifikan terhadap IPM. Artinya bahwa bila anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan bertambah maka akan meningkatkan IPM, *ceteris paribus.* Di sisi lain Mirza, 2012 dalam penelitiannya menemukan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan pada IPM.

Sementara itu hasil penelitian yang kontradiktif ditemukan oleh Harahap (2010) yang menemukan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum/DAU dan Dana Alokasi Khusus/DAK tidak berpengaruh terhadap IPM. Titin (2012) menyatakan bahwa belanja langsung tidak dapat memprediksi indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota di Sumatera Selatan. Sementara penelitian Setiawan dan Hakim (2013) menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto/PDB dan Pajak Pertambahan Nilai/ PPN berpengaruh terhadap IPM dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Estimasi model *Error Correction Model* (ECM), menemukan bahwa krisis ekonomi tahun 2008 berpengaruh terhadap IPM, sementara krisis tahun 1997 dan desentralisasi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap IPM.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, menyebabkan penelitian tentang IPM semakin menarik dan penting untuk dikaji, sehingga peneliti termotivasi untuk meneliti kembali, khususnya faktor-faktor yang diduga memiliki kontribusi terhadap peningkatan IPM Kabupaten/Kota di

Provinsi Bali. Salah satunya adalah kinerja keuangan daerah yang meliputi: rasio pajak (*tax ratio),* pajak per kapita *(tax per capita),* upaya pajak *(tax effort)* dan ruang fiskal *(fiscal space),* serta adanya dugaan bahwa kinerja keuangan daerah tidak serta merta meningkatkan IPM, namun kemungkinan adanya pengaruh variabel alokasi belanja modal (ABM) yang memoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah pada IPM.

Peranan ABM sangat penting dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Oleh karena itu, besarnya belanja modal suatu daerah diduga dapat memperkuat atau memperlemah hubungan kinerja keuangan daerah yang meliputi rasio pajak, pajak per kapita, upaya pajak dan ruang fiskal pada IPM.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan penelitian ini adalah 1) Apakah alokasi belanja modal memoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah (rasio pajak) pada IPM? 2) Apakah alokasi belanja modal memoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah (pajak per kapita) pada IPM? 3) Apakah alokasi belanja modal memoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah (upaya pajak) pada IPM? dan 4) Apakah alokasi belanja modal memoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah (ruang fiskal) pada IPM?

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui kemampuan alokasi belanja modal memoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah dengan parameter rasio pajak, pajak per kapita, upaya pajak, dan ruang fiskal pada IPM.

Berdasarkan teori keagenan hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperluas kasanah teori keagenan, khususnya dalam menjelaskan konflik antara masyarakat dengan pemerintah mengenai kebijakan keuangan yang dapat memengaruhi kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah sekaligus sebagai referensi untuk menentukan strategi yang tepat guna menggali pendapatan daerah dengan sumber daya yang dimiliki agar dapat meningkatkan alokasi belanja modal demi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Teori keagenan dijadikan acuan utama dalam penelitian ini untuk menjelaskan konflik yang terjadi antara pemerintah daerah (Pemda) dan masyarakat yang diwakili oleh DPRD, berkaitan dengan kebijakan keuangan Daerah. Hal ini terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan kedua belah pihak yang terikat dalam suatu kontrak. Dalam kontrak tersebut

pemerintah di samping ingin memuaskan prinsipal juga bertujuan untuk memaksimalkan kepentingannya. Kaitan teori keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara masyarakat dengan pemerintah adalah seperti hubungan antara *principal* dan *agent*. Masyarakat yang diwakili oleh DPRD adalah *principal* dan pemerintah adalah *agent*. *Agent* diharapkan dalam mengambil kebijakan keuangan menguntungkan *principal*. *Principal* memiliki wewenang pengaturan kepada *agent,* dan memberikan sumberdaya kepada agen dalam bentuk pajak, retribusi, dana perimbangan, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pemda wajib menyampaikan laporan kinerja khususnya di bidang keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Bila keputusan agen merugikan bagi *principal* maka akan timbul masalah keagenan. Karena tidak mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen (*assymetric information)* maka *principal* membutuhkan pihak ketiga yang mampu meyakinkan prinsipal bahwa apa yang dilaporkan oleh *agent* adalah benar.

Kinerja adalah capaian/realisasi atas apa yang telah direncanakan. Kinerja seseorang atau organisasi dikatakan baik apabila hasil yang dicapai sesuai dengan target yang direncanakan. Kinerja dikatakan sangat baik apabila pencapaian melebihi target, kinerja dikatakan buruk apabila capaian lebih rendah dari target (Sularso dan Restianto, 2011).

Halim (2007) membagi belanja modal menjadi 2 (dua) bagian : 1) Belanja publik yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contoh belanja publik: pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa, dan pembelian mobil ambulans. 2) Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur, seperti pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan dan pembangunan rumah dinas.

Belanja modal adalah belanja yang outputnya bersifat menambah aset tetap/inventaris yang bermanfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk juga biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas asset. Tingkat investasi modal yang semakin tinggi diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik, yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM.

Pendekatan kontijensi akan digunakan dalam penelitian ini, untuk mengevaluasi keefektifan hubungan antara kinerja fiskal daerah dengan IPM. Berdasarkan pendekatan di atas ada dugaan alokasi belanja modal akan memoderasi pengaruh antara kinerja fiskal daerah pada IPM.

IPM sebagai suatu standar dalam pegukuran pembangunan manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB. IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah), indeks harapan hidup, dan indeks standar hidup layak. IPM digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan di suatu tempat pada suatu waktu. Selain itu, IPM juga sebagai alat pemantau yang bisa memberikan perbandingan antar wilayah serta perkembangan antar waktu sehingga dapat memperlihatkan dampak pembangunan yang dilakukan pada periode sebelumnya (BPS, 2009:3) Konsep penelitian disajikan pada gambar 1.

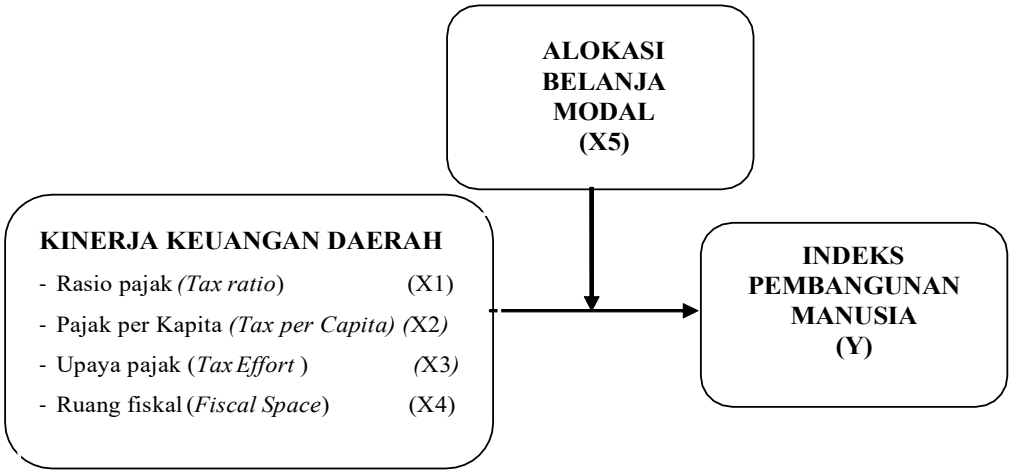

Gambar 1
Konsep Penelitian

Kuncoro (2004) dalam penelitiannya menemukan bahwa pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah yang meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya.

Bhakti dan Hakim (2013), dalam penelitiannya menemukan bahwa PDB dan PPN berpengaruh terhadap IPM dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Estimasi model ECM menemukan bahwa krisis ekonomi tahun 2008 berpengaruh terhadap IPM, sementara krisis tahun 1997 dan desentralisasi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap IPM.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_1 : Alokasi belanja modal memoderasi pengaruh Kinerja Keuangan Daerah berupa rasio pajak pada IPM.

Kontribusi setiap penduduk terhadap pajak daerah ditunjukkan pada pajak per kapita. Semakin tinggi pajak per kapita akan dapat meningkatkan PAD, jadi semakin tinggi juga dana yang tersedia

untuk dialokasikan (salah satunya alokasi ke belanja modal) sehingga semakin tinggi stimulus peningkatan IPM.

Sumardjoko (2013), membuktikan bahwa dana otonomi khusus dan belanja modal pada indeks pembangunan manusia pengaruhnya signifikan, baik pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap indeks pembangunan manusia melalui intervening belanja modal pada tahun 2002-2012. Penelitian ini menunjukkan bahwa antara dana otonomi khusus terhadap indeks pembangunan manusia daerah Papua dan Papua Barat, dan belanja modal berperan sebagai variabel intervening.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_2 : Alokasi belanja modal memoderasi pengaruh Kinerja Keuangan Daerah berupa rasio pajak Per Kapita pada indeks pembangunan manusia.

Mulyanto (2007) menyatakan bahwa upaya fiskal atau *tax effort* adalah jumlah pajak yang sungguh-sungguh dikumpulkan oleh kantor pajak dan dilawankan dengan potensi pajak (tax *capacity potensial*). Usaha pajak dapat diartikan sebagai rasio antara penerimaan pajak dengan kapasitas

atau kemampuan bayar pajak di suatu daerah. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kemampuan membayar masyarakat adalah produk domestik regional bruto (PDRB). Jika PDRB suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah dalam membayar (*ability to pay*) pajak juga akan meningkatkan dana yang berhasil di pupuk untuk mendanai belanja daerah.

Martini dan Dwirandra 2015, dalam penelitiannya menyatakan bahwa rasio ketergantungan pengaruhnya negatif dan signifikan pada ABM, rasio efektivitas PAD pengaruhnya terhadap alokasi belanja modal, rasio tingkat pembiayaan SiLPApengaruhnya negatif dan signifikan pada ABM, rasio ruang fiskal berpengaruh positif dan signifikan pada alokasi belanja modal, rasio efisiensi berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal, dan rasio kontribusi BUMD berpengaruh positif namun tidak signifikan pada alokasi belanja modal.

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disusun hipotesis:

H_3 : Alokasi belanja modal memoderasi pengaruh Kinerja Keuangan Daerah berupa upaya pajak pada IPM

Peningkatan ruang fiskal daerah untuk belanja modal sangat penting karena dapat menjadi stimulus perekonomian daerah. Selain itu, anggaran yang digunakan secara efektif dan efisien di daerah akan dapat mendukung terciptanya ruang fiskal (DJPK, 2014), dan pada akhirnya dapat meningkatkan IPM. Holtz-Eakin (1985) dalam Darwanto (2007) menyatakan bahwa keterkaitan antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah sangat erat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan gambaran hasil penelitian sebelumnya tersebut, peneliti menyusun hipotesis untuk pengembangan penelitian sebagai berikut ini.

H_4 : Alokasi belanja modal memoderasi pengaruh Kinerja Keuangan Daerah berupa ruang fiskal pada IPM.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali yang terdiri dari delapan kabupaten dan satu kota dengan data panel dari periode 2008 hingga 2013. Data berjumlah 54 amatan (terdiri dari 9 kabupaten/kota x 6 tahun), dengan sampel jenuh. Data sekunder yang digunakan adalah laporan realisasi APBD dan IPM tahun 2008-2013) yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

Identifikasi variabel pada penelitian ini adalah

1) Variabel terikat/bebas dalam penelitian ini adalah IPM (Y); 2) Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan (X) berupa: *Tax Ratio* (X1), *Ratio Per Capita* (X2), *Tax Effort* (X3), dan *Fiscal Space* (X4) dan 3) Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah alokasi belanja modal (X5).

Solimun (2010) mengklasifikasikan variabel moderasi menjadi 4 (empat) jenis yaitu *pure moderasi* (moderasi murni), *quasi moderasi* (moderasi semu), *homologiser* moderasi (moderasi potensial) dan Predictor *moderasi* (moderasi sebagai predictor). Masing-masing klasifikasi moderasi dapat diidentifikasi sebagaimana contoh berikut, jika X adalah variabel *predictor*, Y variabel tergantung dan M variabel moderasi maka persamaan regresi yang dapat dibentuk sebagai berikut:

1) Tanpa melibatkan variabel moderasi

$$v_1 = b_0 + b_1X_1 \quad (1)$$

2) Melibatkan variabel moderasi

$$v_1 = b_0 + b_1X_1 + b_2M_1 \quad (2)$$

3) Melibatkan variabel moderasi dan Interaksi

$$v_1 = b_0 + b_1X_1 + b_2M1 + b_3X_1*M_1 \quad (3)$$

Secara singkat, 4 jenis klasifikasi variabel moderasi dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Klasifikasi Variabel Moderasi

No.	Tipe Moderasi	Koefesien
1	Moderasi murni *(Pure Moderasi)*	b2 *non significant* b3 *significant*
2	Moderasi semu (*Quasi Moderator*)	b2 *significant*

		b3 *significant*
3	Moderasi potensial *(Homologiser Moderasi)*	b2 non *significant* b3 non *significant*
4	*M*oderasi sebagai predictor *(Predictor Moderasi)*	b2 *significant* b3 *non significant*

Sumber : Solimun (2010)

Definisi operasional variabel

1) Belanja Modal

Belanja modal adalah jumlah realisasi seluruh belanja pembangunan seperti infrastruktur, investasi baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Belanja modal meliputi belanja tanah, gedung dan bangunan, belanja peralatan dan mesin, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya. Belanja modal yang dimaksud adalah belanja modal pada t_0 karena dampak realisasi belanja modal pada tahun berjalan baru dirasakan di tahun berikutnya.

2) Kinerja keuangan:
   (1) Rasio Pajak (*tax ratio*): rasio pajak daerah merupakan jumlah penerimaan pajak daerah diperbandingkan dengan PDRB.
   (2) *Tax per Capita* adalah jumlah penerimaan pajak yang dihasilkan suatu daerah dibandingkan dengan jumlah penduduk, (rasio pajak x PDRB per kapita),
   (3) *Tax effort* dapat diartikan sebagai rasio antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak di suatu daerah. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kemampuan masyarakat membayar pajak adalah produk domestik regional bruto.
   (4) *Fiscal space* adalah jumlah Pendapatan Daerah dikurangkan dengan pendapatan hibah, pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya, belanja pegawai dan belanja bunga, kemudian dibagi dengan jumlah pendapatannya (DJPK, 2013).
3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM): merupakan indeks gabungan dari tiga indeks, yaitu :
   (1) Indeks harapan hidup, dimensinya umur panjang dan sehat (*longevity*)
   (2) Indeks pendidikan, dimensinya pengetahuan (*knowledge*)
   (3) Indeks standar hidup layak, dimensinya hidup layak (*decent living*)

Teknik analisis data mengunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA), namun sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik (uji normalitas residual, uji autokorelasi, uji multikolineritas dan uji heteroskedastisitas), perumusan model MRA, koefesien determinasi, uji kelayakan model dengan uji f, uji t dan uji hipotesis.

Model persamaan regresi yang akan diuji adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_1.X_5 + b_7X_2.X_5 + b_8X_3.X_5 + b_9X4.X_5 + e \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (3)$$

Keterangan:

Y = Variabel Indeks Pembangunan Manusia

X_1 = Variabel Kinerja Keuangan Daerah berupa *tax ratio*

X2 = Variabel Kinerja Keuangan Daerah berupa Rasio *tax per capita*

X3 = Variabel Kinerja Keuangan Daerah berupa Rasio *tax effort*

X4 = Variabel Kinerja Keuangan Daerah berupa Rasio *fiscal space*

X5 = Variabel Alokasi Belanja Modal

$X_1.X_5$ = Interaksi antara variabel Kinerja Keuangan Daerah berupa *tax ratio* dengan Alokasi Belanja Modal

$X_2.X_5$ = Interaksi antara variabel Kinerja Keuangan Daerah berupa Rasio *tax per capita* dengan Alokasi Belanja Modal

$X_3.X_5$ = Interaksi antara variabel Kinerja Keuangan Daerah berupa *tax effort* dengan Alokasi Belanja Modal

$X_4.X_5$ = Interaksi antara variabel Kinerja Keuangan Daerah berupa *fiscal space* dengan Alokasi Belanja Modal

α = Konstanta

b = Koefesien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

e = Nilai residu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji normalitas residual terhadap 54 amatan, menunjukkan hasil nilai *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) =1.334 dan Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,057. Ini berarti secara tatistik nilai Sig. (2-tailed) > 0,05, jadi data terdistribusi secara normal.

Sedangkan uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin-Watson (DW) =2,212. Nilai dU = 1,7684, dL 1,3669. DW =2,212 berada diantara dU (1,7684) dan 4-dU (4-1,7684), jadi hasil uji autokorelasinya : dU< DW <4-dU yaitu 1,7684<2.212<4-1,7684. Ini berarti d-hitung berada pada daerah bebas autokorelasi.

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa Rasio Pajak nilai *tolerance* adalah 0,402 (> 0,1) dan nilai VIF =2,486 (< 10). Rasio Pajak Per Kapita, nilai *tolerance*-nya =0,207 (> 0,1) dan nilai VIF = 4,833 (< 10). Untuk Upaya pajak, nilai *tolerance*-nya =0,238 (> 0,1) dan nilai VIF =4,207 (< 10). Untuk Ruang Fiskal, nilai *tolerance*-nya =0,229 (> 0,1) dan nilai VIF =4,369

(< 10). Untuk variabel BM, nilai *tolerance*-nya =0,681 (> 0,1) dan nilai VIF =1,469 (< 10). Hasil ini membuktikan bahwa nilai *tolerance* untuk seluruh variabel >10%, VIF semua variabel <10%, artinya data dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Berdasarkan uji *Glejser asym* sig. dari masing- masing variabel menunjukkan hasil di atas 0,05. Hal ini berarti seluruh variabel tersebut dapat dikatakan bebas dari heteroskedastisitas. Sedangkan uji F dapat diketahui *p-value* 0,00, < α =0,05 menunjukkan model penelitian ini layak untuk digunakan sebagai alat analisis menguji pengaruh variabel independen dan moderasi pada variabel dependen. Hal ini artinya variabel kinerja keuangan daerah (seperti rasio pajak, pajak per kapita, upaya pajak, dan ruang fiskal) yang dimoderating alokasi belanja modal berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu IPM.

Berdasarkan hasil uji kelayakan model (uji F), *p-value* = 0,000 < α = 0,05 membuktikan model penelitian ini layak untuk digunakan sebagai alat analisis untuk menguji pengaruh variabel independen dan moderasi pada variabel dependen. Berdasarkan analisis koefisien determinasi dapat dilihat bahwa nilai R^2 =0,594, yang berarti 59,4% variasi perubahan IPM dapat dijelaskan oleh variabel kinerja keuangan daerah yang dimoderating ABM. 40,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar satu variabel bebas dan variabel moderasi secara *partial* dapat menjelaskan variasi variabel terikat. Uji statistik t dilakukan dengan membandingkan hasil nilai signifikansi dengan α = 0,05. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji interaksi *Moderated Regression Analysis* (MRA), hasilnya disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3
Hasil uji *Moderated Regression Analysis*

Variabel	*Unstandardized Coefficients*		*Standardized Coefficients*	T	Sig.
	B	*Std. Error*	Beta		
(Constant)	70,2703456012	4,3127834206	-	16,294	0,000
TR (X_1)	1,815689323424	1,09822806735	1,048	1,653	0,165
TPC (X_2)	0,000000015586	0,000000219954	0,083	0,071	0,944
TE (X_3)	-3,5118808794	1,1778917490	-2,501	-2,981	0,005
FS (X_4)	0,000000000058	0,000000000023	-2,099	2,557	0,014
BM (X_5)	-0,000000017020	0,000000039306	-0,193	-0,433	0,667
TRBM ($X_1.X_5$)	-0,000000033364	0,000000013493	-2,454	-2,473	0,017
TPCBM	0,000000000000	0,000000000000	0,864	0,668	0,508
($X_2.X_5$)	0,000000038964	0,000000012718	4,252	3,064	0,004
TEBM ($X_3.X_5$)	0,000000000000	0,000000000000	-2,987	-2,182	0,034
FSBM ($X_4.X_5$)					
R^2					0,594
F Hitung					7,164
Sig. F					0,000

Sumber: Hasil olah data dengan SPSS

Persamaan regresi yang dihasilkan melalui *Moderated Regression Analysis* (MRA) adalah sebagai berikut:

TE = *Tax Effort*
FS = *Fiscal Space*
BM = Belanja Modal

$$Y = 70{,}2703456012 + 1{,}815689323424\ X_1 + 0{,}000000015586\ X_2 - 3{,}5118808794\ X_3 + 0{,}000000000058\ X_4 - 0{,}000000017020\ X_5 - 0{,}000000033364\ X_1X_5 + 0{,}000000000000\ X_2X_5 + 0{,}000000038964\ X_3X_5 + 0{,}00000000000\ X_4\ X_5 + e \quad \text{..... (12)}$$

Keterangan:

TR = *Tax Ratio*
TPC = *Tax Per Capita*
TRBM = Interaksi Rasio Pajak dengan Belanja Modal
TPCB = Interaksi Pajak Per Kapita dengan Belanja Modal
M = Interaksi Upaya Pajak dengan Belanja Modal
TEBM = Interaksi Ruang Fiskal dengan Belanja Modal
FSBM = Nilai Residu

e

Berdasarkan persamaan regresi di atas dapat diketahui bahwa:

1) Nilai konstanta 70,2703456012 memiliki arti apabila rasio pajak, pajak per kapita, upaya pajak ruang fiskal dan belanja modal besarnya 0 satuan, maka besaran IPM adalah 70,2703456012 satuan.
2) Nilai koefisien regresi rasio pajak sebesar 1,815689323424 memiliki arti apabila rasio pajak bertambah sebesar satu satuan, maka IPM meningkat sebesar 1,815689323424 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan (*cateris paribus*).
3) Nilai koefisien regresi rasio pajak per kapita sebesar 0,000000015586 memiliki arti apabila rasio pajak per kapita bertambah sebesar satu satuan, maka IPM naik sebesar 0,000000015586 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan (*cateris paribus*).
4) Nilai koefisien regresi upaya pajak sebesar -3,5118808794 memiliki arti apabila upaya pajak meningkat sebesar satu satuan, maka mengakibatkan penurunan IPM sebesar 3,5118808794 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan (*cateris paribus*).
5) Nilai koefisien regresiruang pajak sebesar 0,000000000058 memiliki arti bahwa apabila ruang pajak bertambah sebesar satu satuan, maka IPM meningkat sebesar 0,000000000058 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan (*cateris paribus*).
6) Nilai koefisien regresi BM sebesar -0,000000017020 memiliki arti bahwa apabila BM meningkat sebesar satu satuan, maka mengakibatkan penurunan IPM sebesar 0,000000017020 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan (*cateris paribus*).
7) Nilai koefisien moderat rasio pajak BM ($X_1.X_5$) sebesar –0,000000033364 mengindikasikan bahwa setiap interaksi rasio pajak dengan belanja modal meningkat satu satuan akan menurunkan IPM sebesar 0,000000033364 satuandengan asumsi variabel lainnya konstan (*cateris paribus*).
8) Nilai koefisien moderat rasio pajak per kapita BM ($X_2.X_5$) sebesar 0,000000000000 mengindikasikan bahwa setiap interaksi rasio pajak per kapita dengan belanja modal bertambah satu satuan maka IPM meningkat sebesar 0,000000000000 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan (*cateris paribus*).
9) Nilai koefisien moderat upaya pajak BM ($X_3.X_5$) sebesar 0,000000038964 mengindikasikan bahwa setiap interaksi upaya pajak BM dengan belanja modal bertambah satu satuan maka IPM meningkat sebesar 0,000000038964 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan (*cateris paribus*).
10) Nilai koefisien moderat ruang pajak ABM ($X_4.X_5$) sebesar 0,000000000000 mengindikasikan bahwa setiap interaksi ruang pajak dengan belanja modal bertambah satu satuan maka IPM meningkat sebesar 0,000000000000 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan (*cateris paribus*).

Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kemampuan belanja modal dalam memoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah berupa rasio pajak pada IPM. Nilai signifikansi (Sig.t) koefisien interaksi TR dengan BM =0,017 < α = 0,05 artinya belanja modal memoderasi pengaruh rasio pajak pada IPM, sehingga H_1 diterima.

Semakin meningkat belanja modal, maka semakin menurun pengaruh rasio pajak pada IPM. Hal ini sangat wajar karena semakin besar pendapatan pajak yang dialokasikan pada belanja modal akan meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik untuk menunjang peningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat yang ketiganya merupakan faktor pembentuk IPM.

Koefesien TR (X1) pada penelitian ini menunjukkan nilai koefesien yang tidak signifikan, sedangkan koefesien interaksi moderasi TR dan BM (X1.X5) signifikan. Hal ini berarti bahwa belanja modal merupakan variabel moderasi murni (*pure moderation)*. Hasil ini konsisten dengan penelitian Christy (2009), Setyowati dan Suparwati (2012), yan menemukan bahwa DAU, PAD, dan DAK berpengaruh positif pada Indeks Pembangunan Manusia melalui alokasi belanja modal. Sesuai juga dengan penelitian Sumardjoko (2013) yang membuktikan bahwa dana otonomi khusus berpengaruh seginifikan positif terhadap belanja modal APBD Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat periode tahun 2002-2012.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa Alokasi belanja modal memoderasi pengaruh Kinerja Keuangan Daerah berupa pajak per kapita pada IPM. Berdasarkan hasil pengujian MRA, dapat diketahui bahwa alokasi belanja modal tidak mampu memoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah berupa pajak per

kapita pada IPM. Hal ini diduga disebabkan karena pendapatan pajak yang dialokasikan pada belanja modal dalam rangka menunjang program peningkatkan kuantitas dan

kualitas pendidikan, serta kesehatan masyarakat jumlahnya belum cukup untuk memenuhi besarnya jumlah penduduk yang membutuhkan layanan pendidikan dan kesehatan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai koefisien TPC (X2) tidak signifikan, sedangkan koefesien interaksi moderasi TPC dan BM (X2.X5) juga tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa belanja modal merupakan variabel moderasi potensial (*homologiser moderation)*.

Hasil penelitian Lilis (2012) dan Vegirawati (2012) juga sejalan dengan hasil temuan dari penelitian ini yaitu pembangunan Indonesia yang pendanaannya bersumber dari pendapatan pajak per kapita dan belanja langsung kurang mendukung pengembangan sumber daya manusia secara optimal. Kondisi ini juga diduga disebabkan karena belanja modal tidak selalu menghasilkan *output* yang berhubungan langsung dengan fungsi pelayanan publik, sehingga alokasi belanja modal tidak dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Kurang maksimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset tetap yang dihasilkan dari alokasi belanja modal yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik atau digunakan oleh masyarakat, sehingga banyak proyek investasi publik yang tidak tepat sasaran, juga tentunya tidak akan dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Selain itu Eisenhardt (1989) mengasumsikan tiga sifat dasar manusia, salah satunya adalah pada umumnya manusia mementingkan diri sendiri, pemerintah akan lebih mementingkan kepentingan aparatur atau dirinya sendiri daripada mementingkan kepentingan masyarakat, yaitu lebih memprioritaskan belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan pegawai daripada belanja modal yang digunakan untuk fasilitas umum masyarakat.

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa kemampuan belanja modal dalam memoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah berupa upaya pajak pada IPM. Hasil pengujian MRA menunjukkan bahwa nilai signifikansi (Sig.t) koefisiennya 0,004 <α= 0,05 artinya belanja modal memoderasi pengaruh upaya pajak pada IPM, sehingga H_3 diterima.

Berdasarkan hasil uji MRA juga dapat diketahui nilai koefisien TE (X3) menunjukkan hasil yang signifikan, sedangkan koefesien interaksi moderasi TE dan BM (X3.X5) juga hasilnya signifikan. Ini artinya ABM merupakan moderasi semu (*quasi moderator)*. Hal ini berarti sudah adanya terobosan Pemda untuk memanfaatkan *fiscal space* yang ada, *fiscal space* mampu berperan mendorong pembangunan dan penyediaan infrastruktur daerah Propinsi Bali

sehingga diharapkan dapatmeningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan peningkatan IPM. Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa kemampuan belanja modal dalam memoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah berupa ruang fiskal pada IPM. Hasil pengujian menunjukkan koefisien nilai signifikansi (Sig.t) 0,034 < α = 0,05 artinya belanja modalmampu memoderasi pengaruh ruang fiskal terhadap IPM, jadi H_4 diterima. Belanja modal memperkuat pengaruh ruang fiskal pada IPM.

Penelitian ini hasilnya juga menunjukkan bahwa FC (X4) nilai koefisiennya signifikan sedangkan koefesien interaksi moderasi FC dan BM (X4.X5) juga signifikan. Hal ini berarti bahwa belanja modal merupakan variabel moderasi semu (*quasi moderator)*. Temuan penelitian ini sesuai dengan Alexiou (2009) dan Rahayu (2004) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah untuk investasi publik menghasilkan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa alokasi belanja modal memoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah (rasio pajak) pada IPM. Belanja Modal merupakan variabel moderasi murni (*pure moderation)*. Alokasi belanja modal tidak memoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah (pajak per kapita) pada IPM dan Belanja Modal merupakan variabel moderasi potensial (*homologiser moderation)*. Alokasi belanja modal meningkatkan pengaruh kinerja keuangan daerah (upaya pajak, ruang pajak) pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Belanja Modal merupakan variabel moderasi semu (*quasi moderator)*.

Saran

Pemda diharapkan mampu lebih mengeksplorasi dan memanfaatkan potensi-potensi dan sektor-sektor ekonomi daerah yang dapat menambah sumber pendapatan pajak sehingga dapat mendanai seluruh aktivitas pemda secara mandiri dan tidak selalu tergantung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Dapat memanfaatkan dana yang bersumber dari pajak per kapita untuk pengembangan sumber daya manusia secara lebih optimal, membangun infrastruktur publik dan sarana penunjang lainnya yang memang dibutuhkan oleh masyarakat.

Studi kelayakan dan analisis investasi publik selalu harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dibangunnya sarana dan prasarana publik, agar

proyek tersebut dapat dimanfaatkan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Petugas yang ditugaskan mengelola operasional dari sarana dan prasarana yang dibangun harus selalu diperhatikan, agar dapat tercapainya tujuan pembangunan fasilitas publik tersebut.

Berdasarkan hasil uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) menunjukkan bahwa nilai koefesien β dari interaksi antara variabel independen dengan variabel pemoderasi sangat kecil. Hal ini memberi peluang bagi peneliti selanjutnya untuk menggali kemungkinan variabel lain seperti variabel non keuangan, sebagai variabel independen dan pemoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah pada IPM yang belum dapat dikembangkan pada penelitian ini, karena keterbatasan data yang tersedia, serta menggunakan data yang terbaru yaitu tahun 2014.

REFERENSI

Alexiou, Constantinous. 2009. Government Spending and Economic Growth: Econometric Evidence from the South Eastern Europe (SSE*). Journal of Economic and Social Research.* 11(1) : 1-16.

Anonim. 2012. *Deskripsi dan Analisis APBD 2012*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

_____. 2013. *Deskripsi dan Analisis APBD 2013*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)–Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

_____. 2014. *Deskripsi dan Analisis APBD 2014*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) –Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Badan Pusat Statistik. 2009. *Indeks Pembangunan Manusia* 2007-2008, Jakarta:Indonesia.

_____. 2012. *Data Sosial Kependudukan Provinsi NTT.* Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Bhakti, M. Setiawan dan Hakim, A. 2013. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. *Jurnal Economia*, Vol. 9 (1). 2013

Christy, Fhino Andrea dan Priyo Hari Adi. 2009. Hubungan Antara DAU, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. *The 3rd National Conference* UKWMS Surabaya*,* October 10th 2009

Darwanto dan Y. Y. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik,* Vol 08:24-31.

Eisenhardt K.1989. Building Theories from Case Study Research*, Academy of Management Review*, Vol. 14, No. 4, 532-550.

Fhino A. C. dan Priyo H. A. 2009. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal Dan Kualitas Pembangunan Manusia. *Naskah lengkap* The 3rd National Conference UKWMS" Surabaya, October 10th 2009.

Gembira, M. (2011) "Pengaruh Kapasitas Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintahan Kota/Kabupaten Di Sumatera Utara" (*Tesis*). Medan: Universitas Sumatera Utara.

Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ke-3. Jakarta: Salemba Empat.

_____. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.

Harahap, Riva Ubar. 2010."Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara" (*Tesis*). Medan: Universitas Sumatera Utara.

Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta:Erlangga.

Lilis, S. dan Yohana, K. S. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi DAU, DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Prestasi,* Vol 9 (1), 2012.

Martini dan Dwirandra, 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 10.2 (2015):426-443.*

Mirza Denni S. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009, *Economics Development Analysis Journal EDAJ.* 1(1) (2012)

Rahayu Tri. 2004. Peranan Sektor Publik Lokal Dalam Pertumbuhan Ekonomi Regional di Wilayah Surakarta. *Jurnal Kinerja* Vol. VIII :133-147.

Solimun, 2010. *Pemodelan Persamaan Struktural Pendekatan PLS*, Fakultas MIPA Universitas Brawijaya, Malang.

Sularso, H., Restianto, Y.E. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi

Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*, Vol.1 No.2:109-124. Sumardjoko I. (2013). "Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus Terhadap Indek Pembangunan Manusia Papua Dan Papua Barat Dengan Belanja Modal Sebagai Intervening" (*Tesis*): Universitas Airlangga

Titin, V. 2012. Pengaruh Alokasi Belanja Langsung Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia di Kabupaten Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius*) Vol 2:65-74.

UNDP. 2014. *Human Development Report.* Oxford University Press. New York

. 2013. *Human Development Report 2013.* Oxford University Press. New York.

Berdasarkan Analisis dari ke 2 Jurnal diatas terdapat persamaan yaitu :

1. Penelitian menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Keadaan ini member indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki kontribusi positif terhadapbelanja modal
2. Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh PAD, terhadap belanja modal, hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi tidak merata dan juga peningkatan PAD lebihbanyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan biaya langsung lainnya daripada untuk membiayai belanja modal
3. Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi hubungan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal.

Adapun perbedaannya ;

1. Belanja modal memoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah (rasio pajak) pada IPM. Belanja Modal merupakan variabel moderasi murni (*pure moderation)*.
2. Alokasi belanja modal tidak memoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah (pajak per kapita) pada IPM dan Belanja Modal merupakan variabel moderasi potensial (*homologiser moderation)*. A. Belanja Modal merupakan variabel moderasi semu (*quasi moderator)*.

Saran

Pemda diharapkan mampu lebih mengeksplorasi dan memanfaatkan potensi-potensi dan sektor-sektor ekonomi daerah yang dapat menambah sumber pendapatan pajak untuk meningkatkan PAD sehingga dapat mendanai seluruh aktivitas pemda secara mandiri dan tidak selalu tergantung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (DAU).